



KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA

# **MENUJU PEMBANGUNAN EKONOMI SULAWESI SELATAN LEBIH INKLUSIF**

Asdep Pengembangan Ekonomi Daerah Dan Sektor Riil  
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro Dan Keuangan

Makassar, 8 Mei 2018

# Outline

- 1. Perekonomian Global dan Indonesia**
- 2. Perekonomian Sulawesi Selatan**
- 3. Arah Kebijakan Ekonomi : Pemberdayaan SHAT, KUR, Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, Kerja Sama Daerah**



# Perekonomian Global dan Indonesia



# EKONOMI GLOBAL DIPERKIRAKAN MENINGKAT

*Namun Beberapa Tantangan Global Masih Membayangi*

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Negara	World Bank Januari 2018		IMF Januari 2018	
	2017	2018	2017	2018
Dunia	3.0	3.1	3.7	3.9
Negara Maju	2.3	2.2	2.3	2.3
Amerika Serikat	2.3	2.5	2.3	2.7
Uni Eropa	2.4	2.1	2.4	2.2
Jepang	1.7	1.3	1.8	1.2
Negara Berkembang	4.3	4.5	4.7	4.9
Negara Berkembang Asia	6.4	6.2	6.5	6.5
India	6.7	7.3	6.7	7.4
China	6.8	6.4	6.8	6.6
<b>Indonesia</b>	<b>5.1</b>	<b>5.3</b>	-	-

## Risiko Ekonomi Global



- ❑ Kebijakan fiskal ekspansif di AS mendorong peningkatan suku bunga acuan AS di periode ke depan sehingga berpotensi memicu tekanan pada *capital flow*. Namun demikian, dikarenakan kondisi likuiditas global masih cukup tinggi akibat kebijakan *quantitative easing* di Uni Eropa dan Jepang, dampak kenaikan FFR diperkirakan tidak sampai memicu *outflow*
- ❑ Risiko kenaikan suku bunga acuan AS akan memperkecil ruang bagi BI untuk menurunkan suku bunga lebih jauh
- ❑ Konsensus perkiraan harga minyak dunia sebagai acuan pada kisaran US\$ 55-60 per barel. Pemulihan pertumbuhan ekonomi global akan berdampak pada peningkatan permintaan energi termasuk minyak mentah dunia.

Sumber: WEO Januari 2018 IMF, GEP Januari 2018 World Bank



# OUTLOOK EKONOMI INDONESIA 2018

- Didorong dengan membaiknya kondisi ekonomi global kendati masih dibayangi ketidakpastian, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mencapai 5,4% pada 2018 seiring pertumbuhan investasi dan volume perdagangan global yang meningkat.
- Dengan tekanan *administrated price*, inflasi diperkirakan 2,5% - 4,5% di tahun 2018.

ASUMSI MAKRO 2018	
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.4
Inflasi (% yoy)	3.5
Nilai Tukar (Rp/USD)	13.400
Suku Bunga SPN (%)	5.2
Harga Minyak (US\$/Barel)	48
Lifting Minyak (ribu barel/hari)	800
Lifting Gas (ribu barel/hari)	1.200



## Pertumbuhan Ekonomi

Proyeksi 2018	BI	Kemenkeu	World Bank
<b>PDB</b>	<b>5.1 – 5.5</b>	<b>5.4</b>	<b>5.3</b>
Konsumsi RT	4.9 – 5.3	5.1	5.2
Konsumsi Pemerintah	3.1 – 3.5	3.8	3.8
Investasi	5.8 – 6.2	6.3	6.0
Ekspor	5.3 – 5.7	5.1	2.4
Impor	4.5 – 4.9	4.5	2.0

## Inflasi

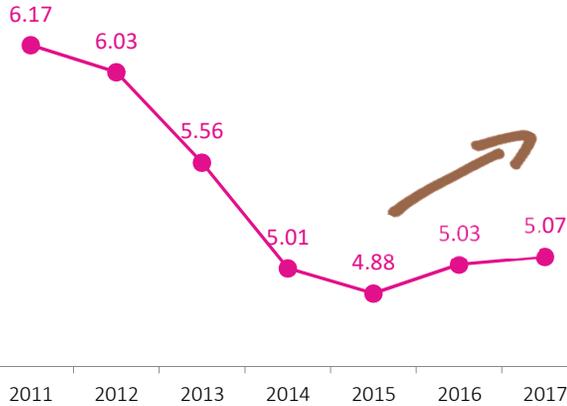
Proyeksi Inflasi 2018	%yoy
<b>IHK</b>	<b>3,5</b>
Inti	3,6
Administered Price	3,2
Volatile Food	3,2

*Inflasi 2018 diperkirakan meningkat didorong oleh peningkatan inflasi inti dan VF*

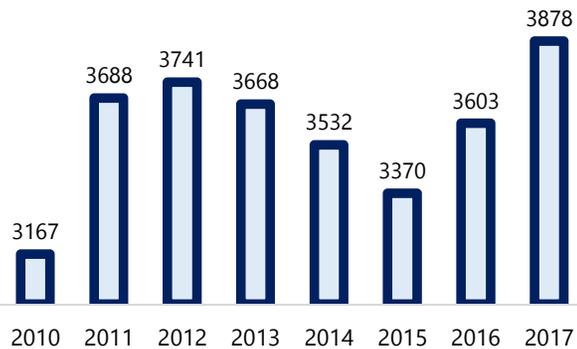


# EKONOMI INDONESIA STABIL, INFLASI TERKENDALI

## PDB (%yoy)



## PDB per Kapita (USD)



Pada tahun 2017, perekonomian Indonesia tumbuh 5,07% yoy, stabil dan masih berada di atas tren global. Perekonomian domestik juga didukung oleh tingkat inflasi yang rendah dan terjaga di kisaran target pemerintah dan Bank Indonesia 4±1%.

## Inflasi (%yoy)



### Umum

8,36	3,35	3,02	3,61
(2014)	(2015)	(2016)	(2017)



### Inti

4,93	3,95	3,07	2,95
(2014)	(2015)	(2016)	(2017)



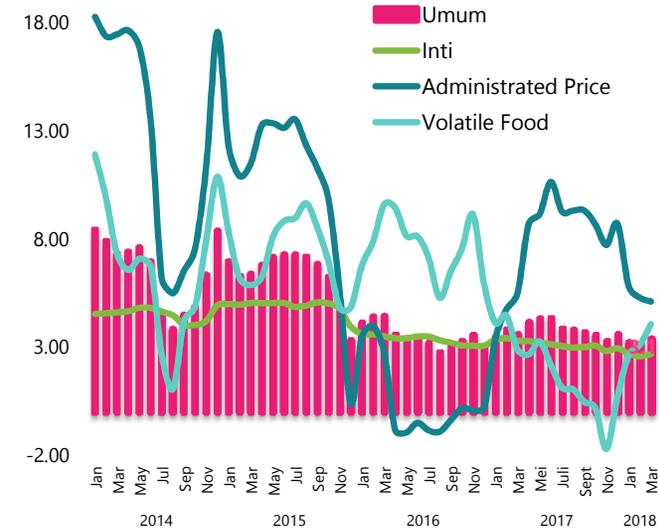
### Administered Price

17,57	0,39	0,21	8,70
(2014)	(2015)	(2016)	(2017)



### Volatile Food

10,88	4,84	5,92	0,71
(2014)	(2015)	(2016)	(2017)

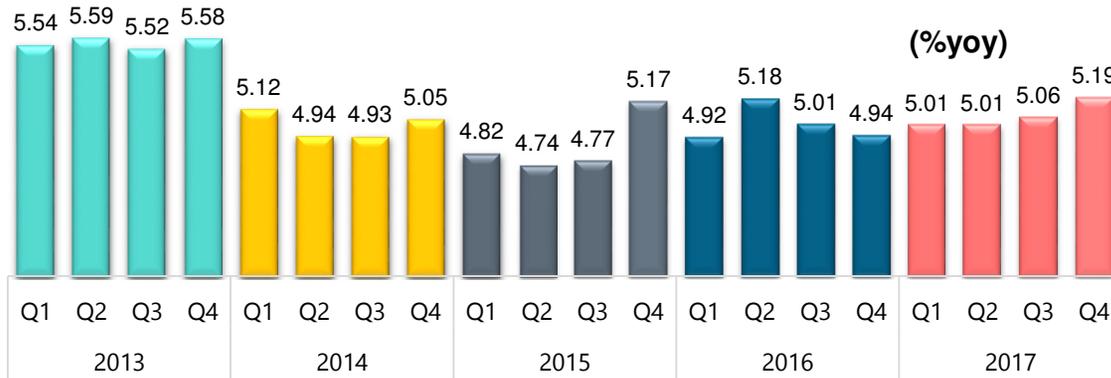




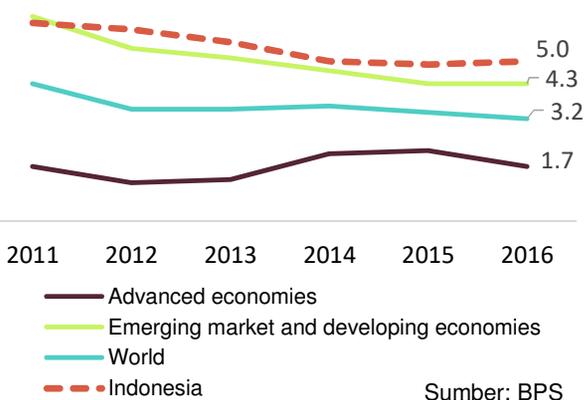
# PEREKONOMIAN INDONESIA

## TUMBUH POSITIF

Periode 2014-2016, ditengah perlambatan ekonomi global, pelemahan harga komoditas, dan kondisi geopolitik yang belum kondusif, ekonomi Indonesia mampu tumbuh rata-rata 5,0 persen per tahun dan berlanjut pada tahun 2017 tumbuh 5,07 persen.



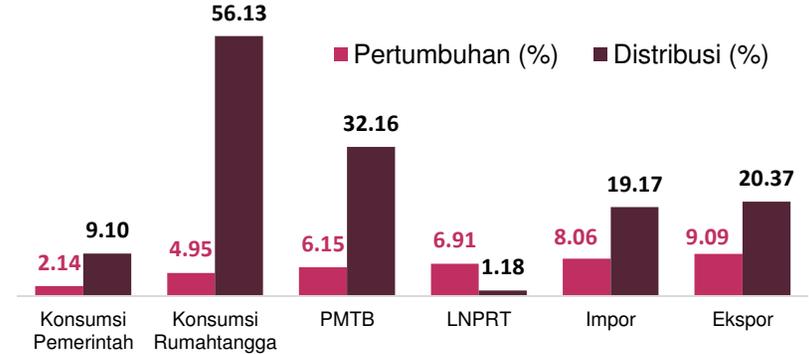
### Pertumbuhan ekonomi kawasan (%yoy)



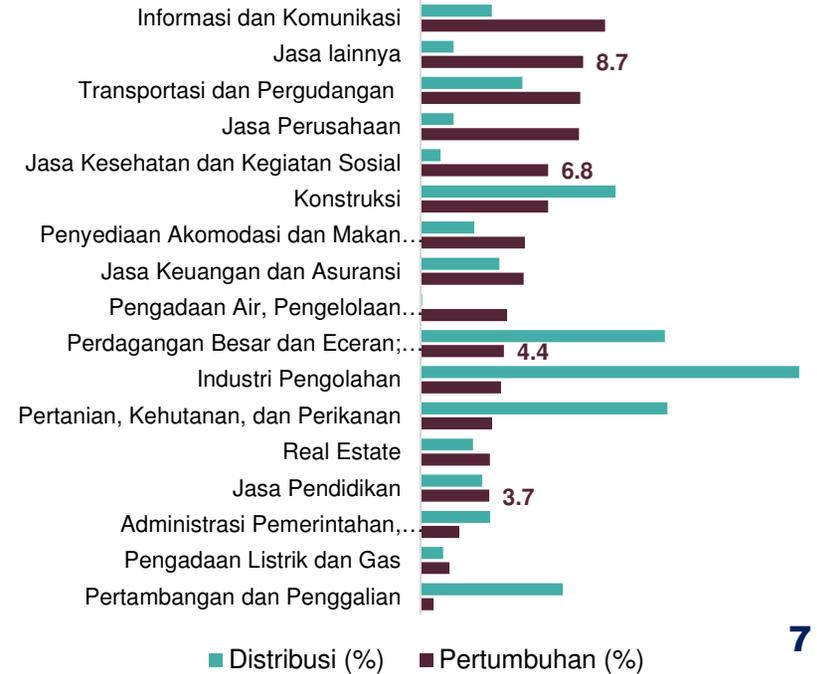
Sumber: BPS

- ✓ **Motor penggerak terbesar perekonomian Indonesia masih ditopang konsumsi RT sebesar 56,13 persen dengan pertumbuhan 4,95 persen.**
- ✓ **Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh ekspor barang dan jasa sebesar 9,09 persen**
- ✓ **Dari sisi produksi pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai Informasi dan Komunikasi (9,8 persen), jasa lainnya (8,70 persen), Transportasi dan Pergudangan (8,50 persen)**

### Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran 2017



### Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor 2017





## INDUSTRI PENGOLAHAN TUMBUH STABIL DI TAHUN 2017 SEBESAR 4.27%

... beberapa industri yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kinerja ekspor serta mendukung hilirisasi antara lain industri Tekstil dan Produk Teksti, Industri Logam (Besi dan Baja) dan Industri elektronik

Sektor Industri	2014	2015	2016				2016	2017				2017	Share 2017
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		
<b>Industri Pengolahan</b>	<b>4.64</b>	<b>4.33</b>	4.68	4.62	4.47	3.28	<b>4.26</b>	<b>4.28</b>	<b>3.50</b>	<b>4.85</b>	<b>4.46</b>	<b>4.27</b>	<b>21.22</b>
Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-2.12	-1.13	5.96	5.30	2.07	-1.73	2.84	0.18	0.01	-0.21	-1.29	-0.32	2.22
Industri Makanan dan Minuman	9.49	7.54	7.60	8.13	9.98	7.53	8.33	7.70	6.48	8.92	13.76	9.23	6.45
Industri Pengolahan Tembakau	8.33	6.24	5.17	2.90	0.02	-1.28	1.58	2.72	0.79	1.12	-7.64	-0.84	0.85
Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	1.56	-4.79	-1.34	-0.07	-0.19	1.28	-0.09	0.32	3.78	4.58	6.39	3.76	1.17
Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	5.62	3.97	9.27	8.69	9.42	6.22	8.36	8.34	4.55	-0.97	-2.75	2.22	0.27
Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	6.12	-1.63	3.17	3.06	2.29	-1.55	1.74	-3.34	-2.11	1.36	4.85	0.13	0.62
Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	3.58	-0.16	-1.55	4.98	3.02	3.97	2.61	7.85	-1.23	-0.35	-4.52	0.33	0.73
Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	4.04	7.61	-1.12	6.16	7.33	11.14	5.84	10.30	8.77	5.26	-5.46	4.53	1.84
Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	1.16	5.04	-4.18	-11.56	-11.84	-6.08	-8.50	6.71	-1.03	1.04	3.10	2.47	0.72
Industri Barang Galian bukan Logam	2.41	6.03	7.42	3.49	7.69	3.44	5.47	0.78	-4.17	-1.70	1.58	-0.86	0.70
Industri Logam Dasar	6.01	6.21	7.18	0.10	-2.86	-0.27	0.99	-2.17	6.71	12.45	7.05	5.87	0.83
Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	2.94	7.83	8.09	2.12	5.80	1.57	4.33	3.09	4.44	3.43	0.27	2.79	2.08
Industri Mesin dan Perlengkapan	8.67	7.58	15.96	9.76	0.93	-4.50	5.05	0.20	6.30	6.33	9.51	5.55	0.32
Industri Alat Angkutan	4.01	2.40	3.61	8.06	3.25	3.29	4.52	3.06	0.61	5.64	5.38	3.68	1.99
Industri Furnitur	3.60	5.17	1.24	-0.06	-0.53	1.25	0.46	4.39	1.29	5.44	3.79	3.71	0.26
Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	7.65	4.66	0.01	-3.26	-5.35	-3.44	-3.04	-0.85	-3.06	-0.73	-2.22	-1.72	0.16 <b>8</b>

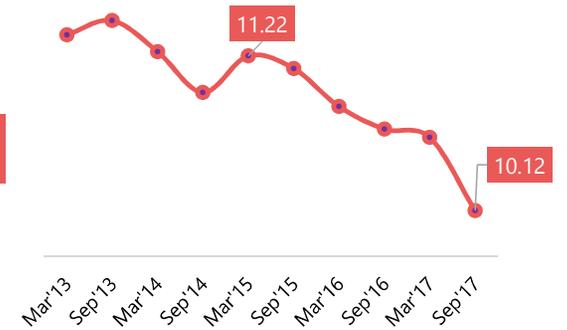


## INDIKATOR SOSIAL MEMBAIK

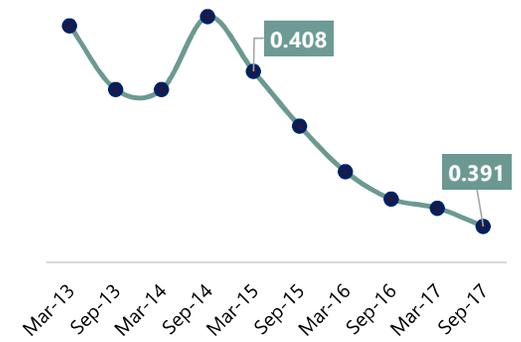
Seiring dengan peningkatan kondisi ekonomi, indikator sosial semakin membaik tercermin dari menurunnya tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran dan rasio gini sejak 2015



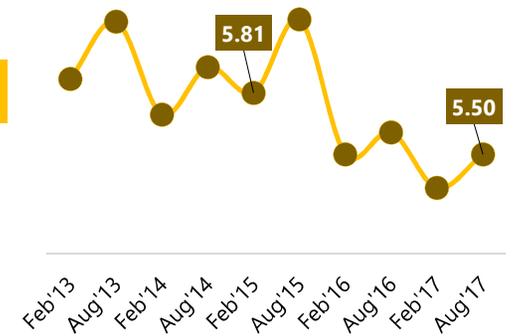
### Tingkat Kemiskinan (%)



### Rasio Gini (%)



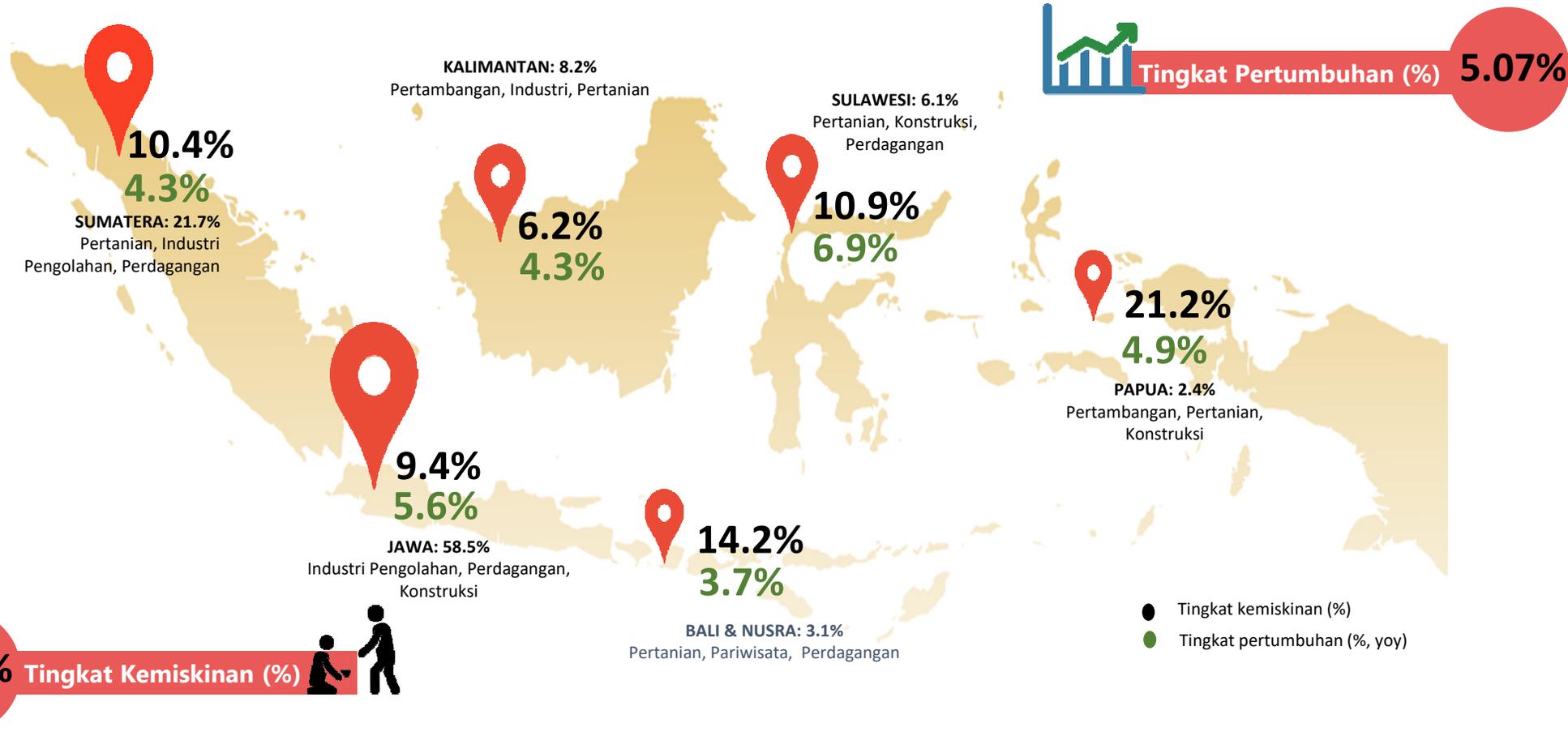
### Tingkat Pengangguran (%)





# KEMISKINAN DAN PERTUMBUHAN REGIONAL

Disparitas pertumbuhan antar daerah masih lebar, variasi angka kemiskinan juga lebar



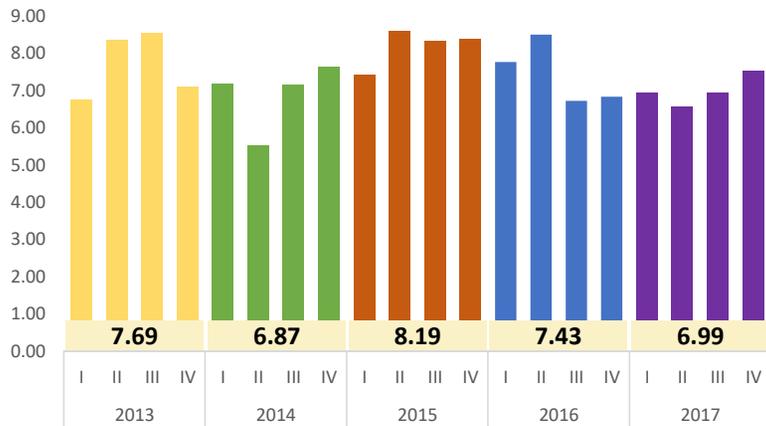


# Perekonomian Sulawesi Selatan



# PEREKONOMIAN REGIONAL SULAWESI TW IV-2017

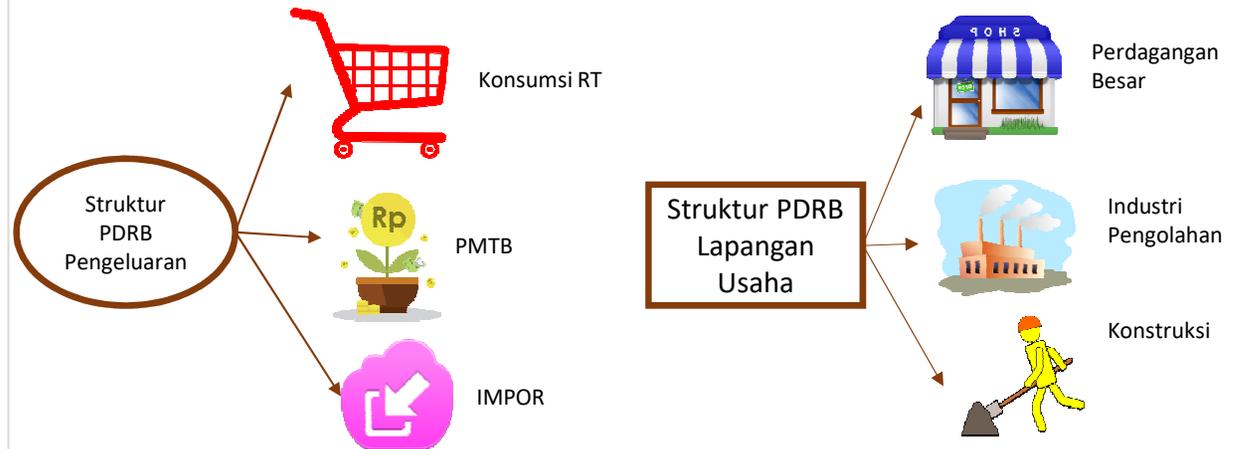
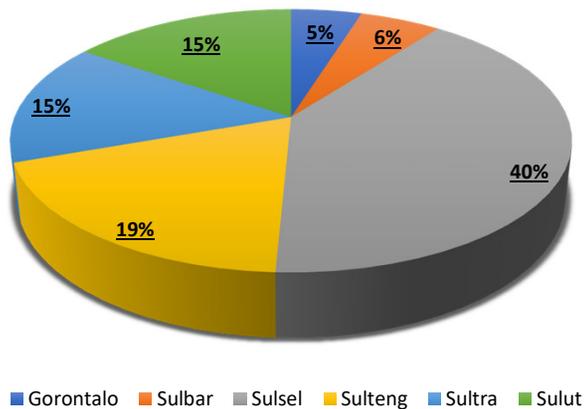
## Perkembangan Ekonomi Sulawesi YoY (%)



- ❑ Struktur PDRB Regional Sulawesi dari sisi pengeluaran pada Triwulan IV didominasi oleh Konsumsi Rumah Tangga, hal ini dipengaruhi perayaan hari besar Natal dan Tahun baru.
- ❑ Kenaikan PMTB di Sulawesi dipengaruhi oleh pelaksanaan proyek-proyek strategis Nasional seperti proyek pembangkit listrik (Gorontalo), dan pembangunan perkantoran dan pusat hiburan di Sulawesi Utara.
- ❑ Peningkatan ekspor diakibatkan banyaknya impor barang modal terkait penyelesaian smelter di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, perelengkapan mesin pengolahan industri kelapa dan ikan di Sulawesi Utara, serta bahan baku pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/Angin (PLTB) di Sulawesi Selatan.
- ❑ Dari sisi lapangan usaha, struktur PDRB Sulawesi didominasi oleh Industri Pengolahan dimana hal ini dipengaruhi oleh peningkatan produksi feronikel dan amonia



## Distribusi PDRB Regional Sulawesi



Sumber: BPS, BI



## PERTUMBUHAN EKONOMI SULAWESI SELATAN TAHUN 2017 MENURUN DIBANDINGKAN TAHUN 2016

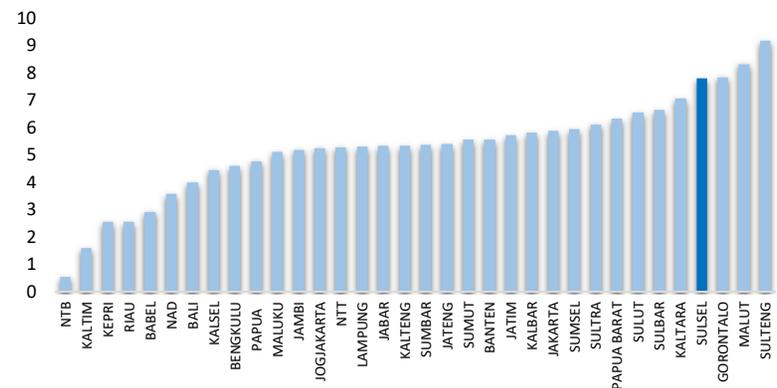
Kinerja perekonomian Provinsi Sulawesi tahun 2017 tumbuh 7.78% (yoy), lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 6,70%(yoy). Dan lebih baik dibandingkan Ekonomi Nasional yaitu (5.09 %). Secara keseluruhan kinerja perekonomian Sulsel tahun 2017 mencapai 7.23%(yoy) , sedikit melambat dibandingkan tahun 2016 7.42%(yoy), lebih tinggi dari nasional 5.07% (yoy)

	Target 2017	Realisasi 2017
Tingkat Pertumbuhan (%YoY)	<b>8,3</b>	<b>7,78</b>
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	<b>5,2</b>	<b>5,61</b>
Tingkat Kemiskinan	<b>7,9</b>	<b>9,48</b>
Investasi	<b>Rp 15,79 T</b>	<b>Rp 11,45 T</b>

Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan



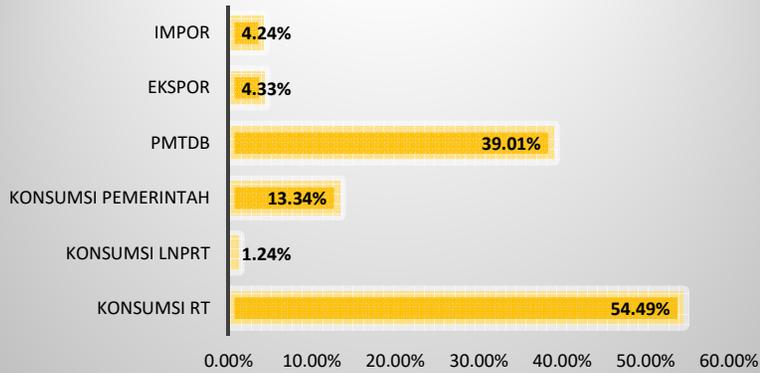
PDRB PROVINSI INDONESIA



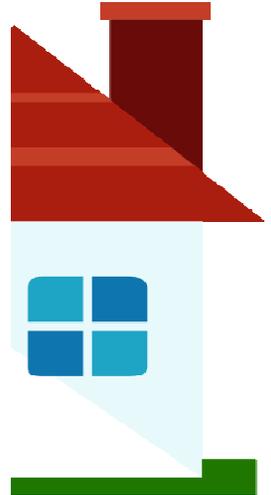


# PERTUMBUHAN DARI SISI PERMINTAAN MASIH DIDOMINASI OLEH KONSUMSI RUMAH TANGGA DAN PMTB

**DISTRIBUSI PDRB SULSEL TW IV**



- **Konsumsi Rumah Tangga** meningkat seiring dengan tingginya *spending* masyarakat akibat momentum libur akhir tahun yang didahului dengan libur perayaan Natal. Secara keseluruhan ditahun 2017 konsumsi RT juga meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
- **Impor Sulsel kembali mengalami penurunan** setelah sebelumnya naik drastis yang diakibatkan oleh tingginya jumlah impor alat-alat penunjang pembangunan infrastruktur seperti pembangkit listrik, kereta api, hingga bendungan. Dengan kata lain kenaikan impor pada kuartal sebelumnya hanyalah bersifat temporer dalam rangka proses reformasi struktural
- **Peningkatan Ekspor** ditopang oleh perbaikan pasar global dipengaruhi oleh membaiknya ekonomi mitra dagang utama Sulawesi Selatan seperti Jepang, Amerika, dan Tiongkok



Laju Pertumbuhan PDRB (%)

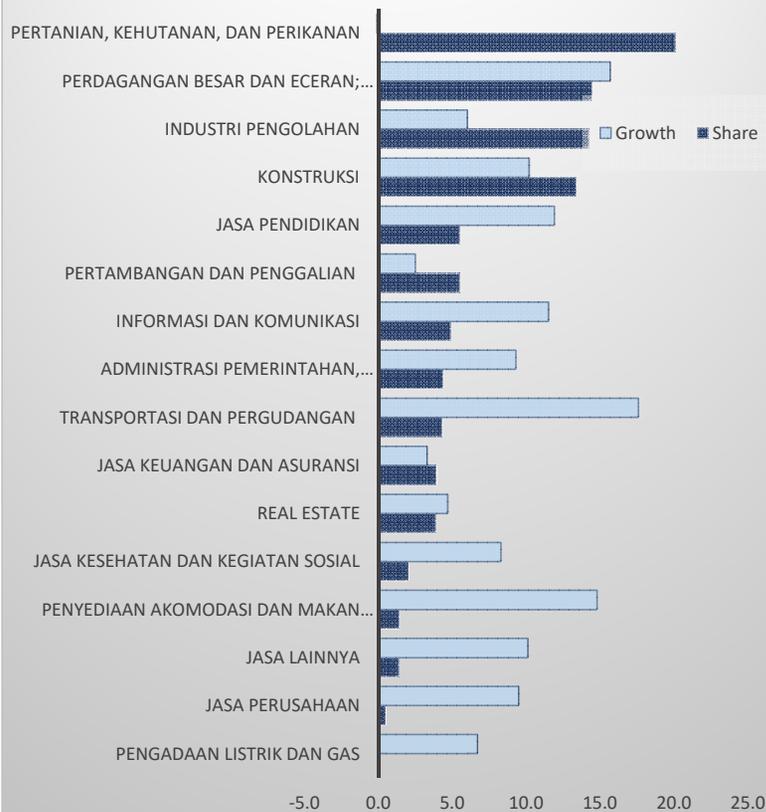
Pengeluaran	2016					2017				
	Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
Konsumsi RT	5.28	5.62	5.73	5.29	5.48	5.54	6.47	6.15	6.41	6.15
Konsumsi LNPRT	4.66	4.48	3.98	0.16	3.26	6.57	7.35	5.81	7.58	6.83
Konsumsi Pemerintah	3.42	8.37	-3.52	-7.43	-1.34	7.36	8.25	8.46	8.59	8.18
PMTDB	9.33	9.84	6.63	2.96	7.02	26.60	-4.19	-12.55	-6.06	-0.87
Ekspor	-33.49	-26.19	-16.80	-5.93	-20.52	26.60	-4.19	-12.55	-6.06	-0.87
Impor	-14.18	6.72	-45.68	44.56	-6.93	74.73	12.31	45.38	-15.47	20.19

Sumber : BPS



# EKONOMI SULAWESI SELATAN TRIWULAN IV MASIH DITOPANG OLEH SEKTOR PERTANIAN DAN PERDAGANGAN BESAR

## PDRB SEKTORAL SULSEL TW IV

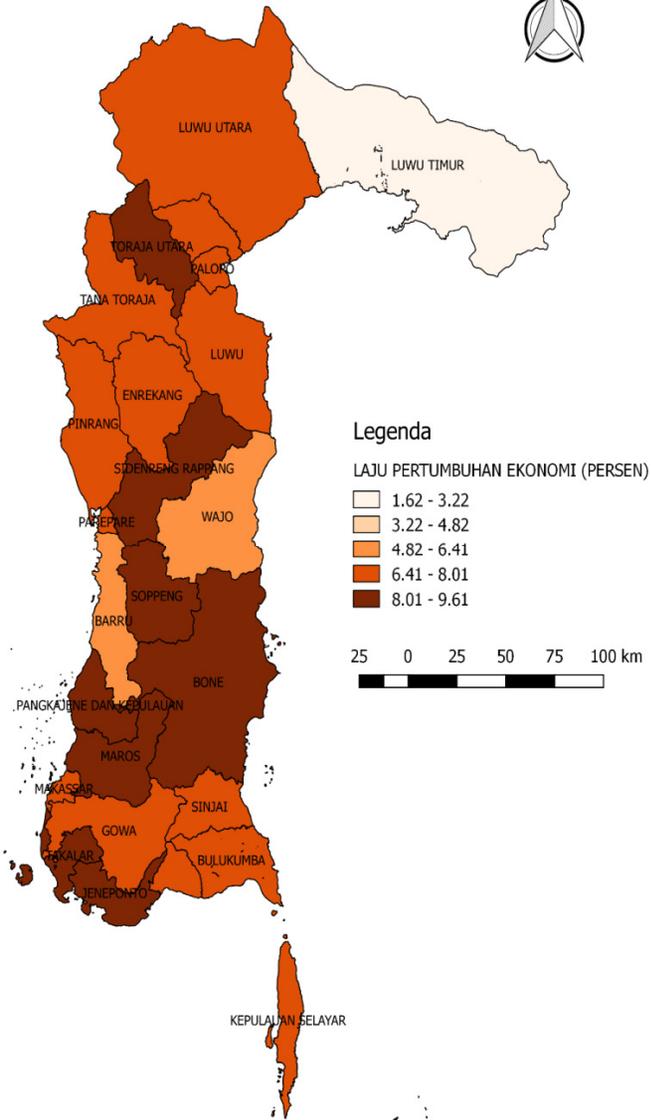


- **Sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan menurun drastis di TW IV** selain disebabkan oleh dampak lanjutan banjir yang terjadi pada triwulan ini, juga dipengaruhi oleh pola musiman dimana pada periode ini masih berlangsung peremajaan tanaman perkebunan utama.
- **Sektor Pertambangan** sedikit naik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, hal ini didukung oleh naiknya harga nikel pada periode ini. Namun peningkatan ini tidak terlalu tinggi diakibatkan pada periode ini perusahaan nikel tertinggi di Sulsel sedang melakukan perawatan terhadap mesin-mesinnya.
- **Sektor Konstruksi meningkat** disebabkan realisasi proyek infrastruktur di Sulsel, serta pola musiman yang terjadi di Sulsel di akhir tahun.

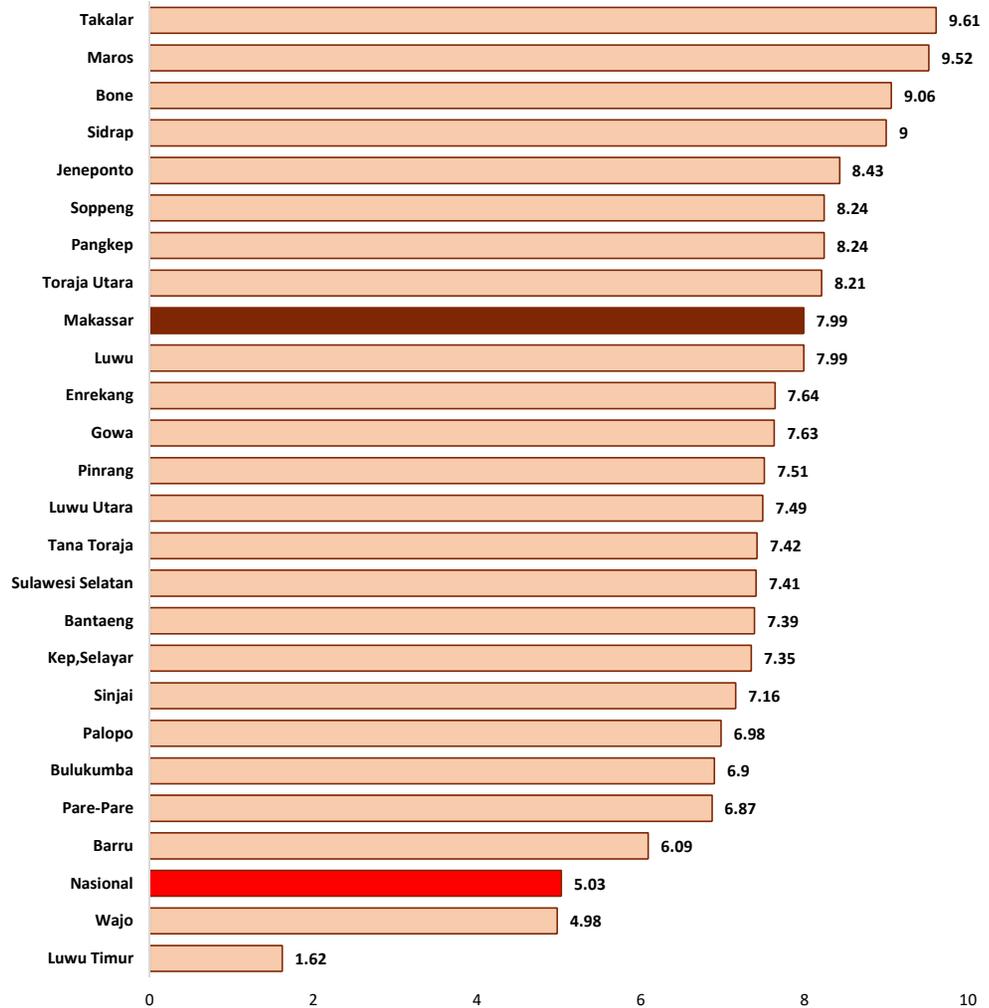


Uraian	2016					2017				
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total
<b>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</b>	0.73	4.24	5.34	24.86	7.86	14.37	4.77	3.35	-0.11	5.34
<b>Pertambangan dan Penggalian</b>	2.0	5.2	1.6	-3.3	1.2	8.4	6.2	1.7	2.5	4.5
<b>Industri Pengolahan</b>	12.4	8.1	11.2	2.2	8.2	4.9	4.2	4.9	6.0	5.0
<b>Pengadaan Listrik dan Gas</b>	10.1	17.3	17.3	2.8	11.5	9.8	3.5	4.6	6.7	6.1
<b>Konstruksi</b>	9.3	9.7	6.1	2.5	6.7	7.0	8.9	8.3	10.2	8.7
<b>Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor</b>	8.9	11.0	9.7	9.9	9.9	7.3	10.2	9.6	15.7	10.7
<b>Transportasi dan Pergudangan</b>	13.5	8.9	9.1	0.2	7.8	1.3	6.1	8.6	17.6	8.4
<b>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</b>	9.8	8.9	8.7	6.6	8.5	6.8	11.0	13.7	14.8	11.7
<b>Informasi dan Komunikasi</b>	8.2	8.0	7.9	8.4	8.1	9.5	11.2	9.8	11.5	10.5
<b>Jasa Keuangan dan Asuransi</b>	9.6	17.4	12.1	15.4	13.6	4.3	5.3	4.7	3.3	4.4
<b>Real Estate</b>	7.0	6.9	5.4	6.2	6.4	4.1	4.4	4.7	4.7	4.5
<b>Jasa Perusahaan</b>	7.9	7.7	8.1	7.8	7.9	6.8	8.7	8.6	9.5	8.4
<b>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib</b>	7.8	8.6	-8.2	-7.6	-0.2	0.2	-0.1	12.2	9.3	5.2
<b>Jasa Pendidikan</b>	7.7	9.2	8.0	3.0	6.9	7.1	9.5	10.1	11.9	9.7
<b>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</b>	9.5	8.4	7.5	8.4	8.5	7.4	9.5	9.9	8.3	8.8
<b>Jasa lainnya</b>	9.7	10.0	10.0	9.6	9.8	6.8	9.6	11.6	10.1	9.6
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>7.24</b>	<b>8.02</b>	<b>6.80</b>	<b>7.67</b>	<b>7.42</b>	<b>7.75</b>	<b>6.77</b>	<b>6.70</b>	<b>7.78</b>	<b>7.23</b>

Sumber : BPS, Bank Indonesia



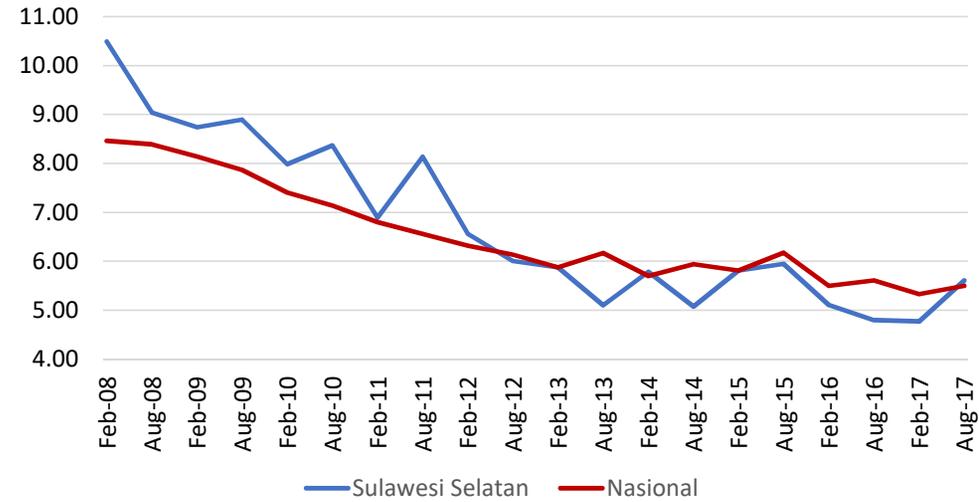
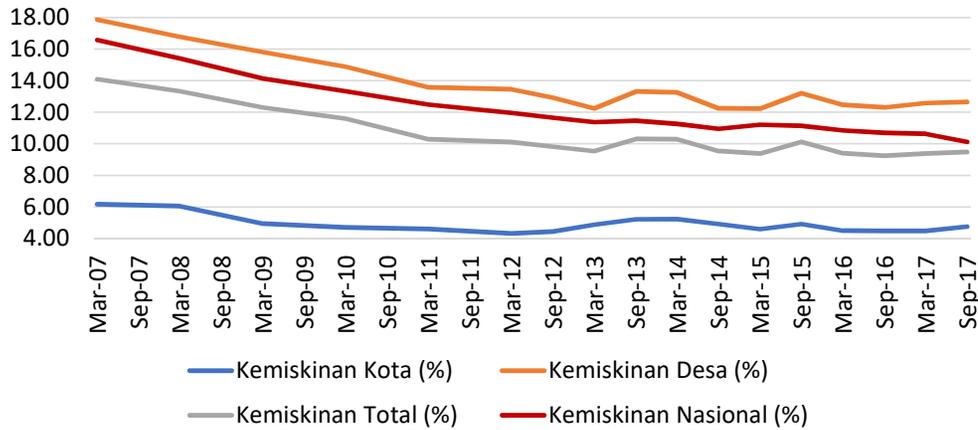
### Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016 (Persen)



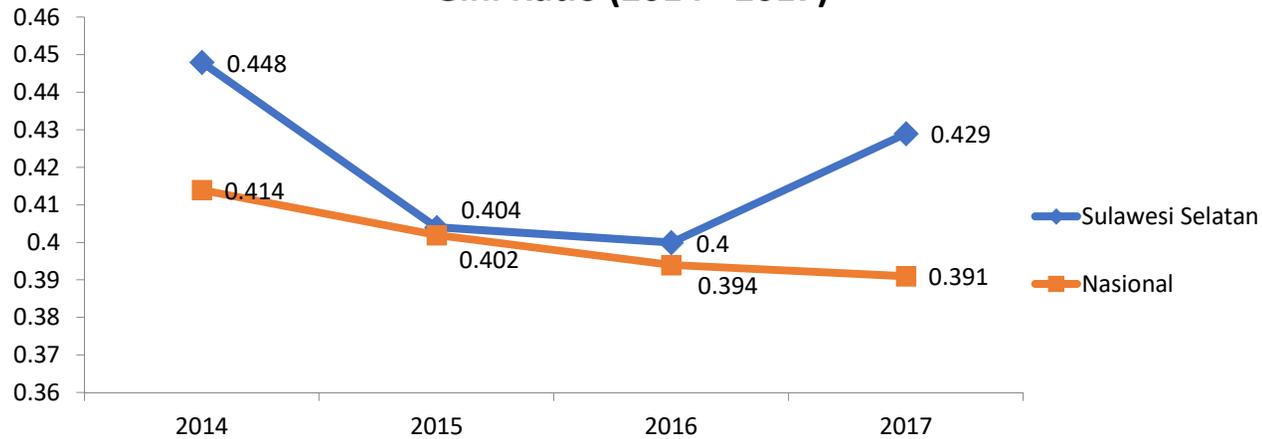


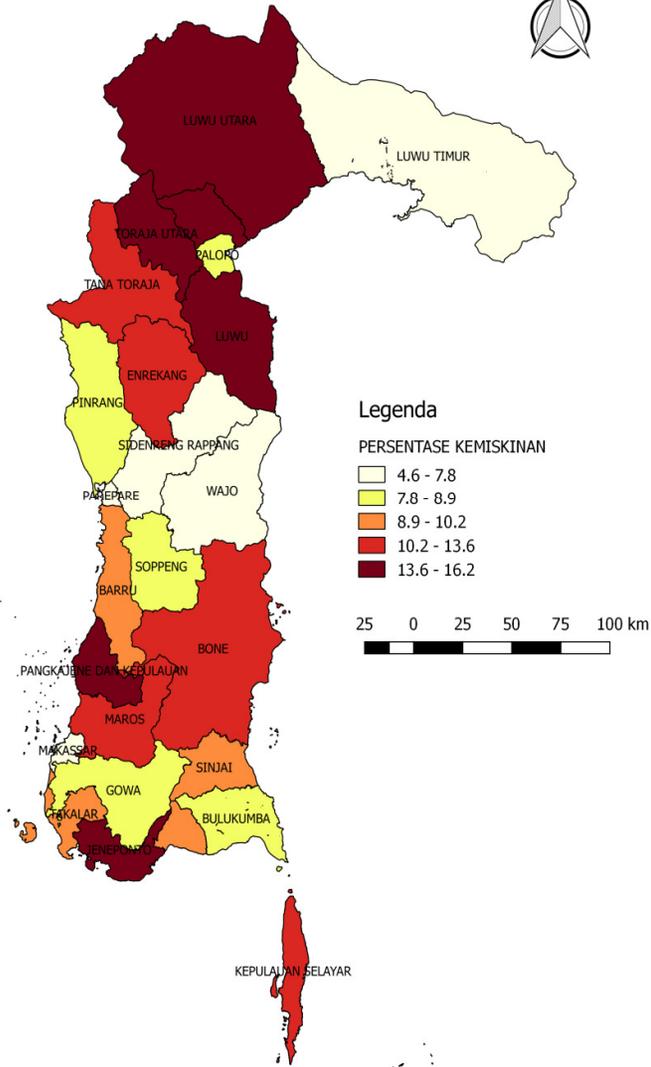
# TINGKAT KEMISKINAN, TINGKAT PENGANGGURAN, DAN GINI RATIO DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

### Tingkat Kemiskinan (%)

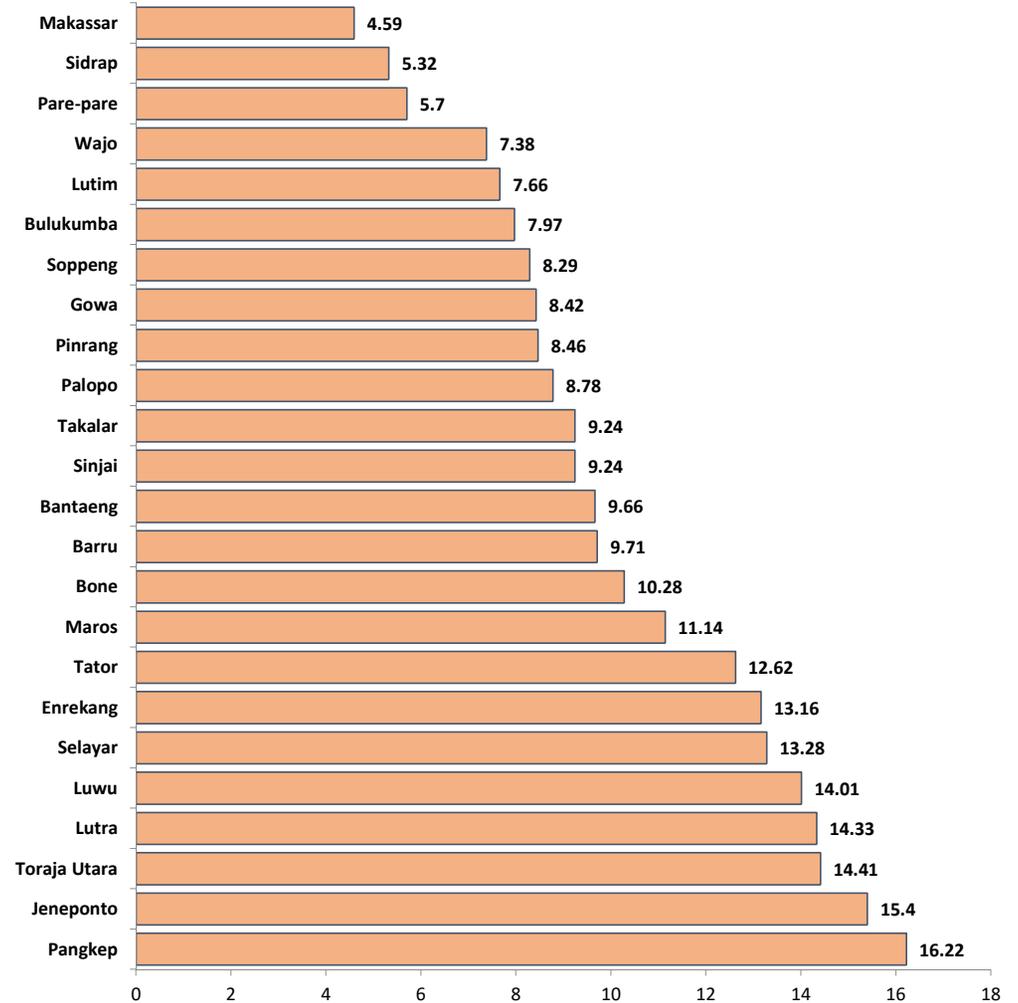


### Gini Ratio (2014 - 2017)



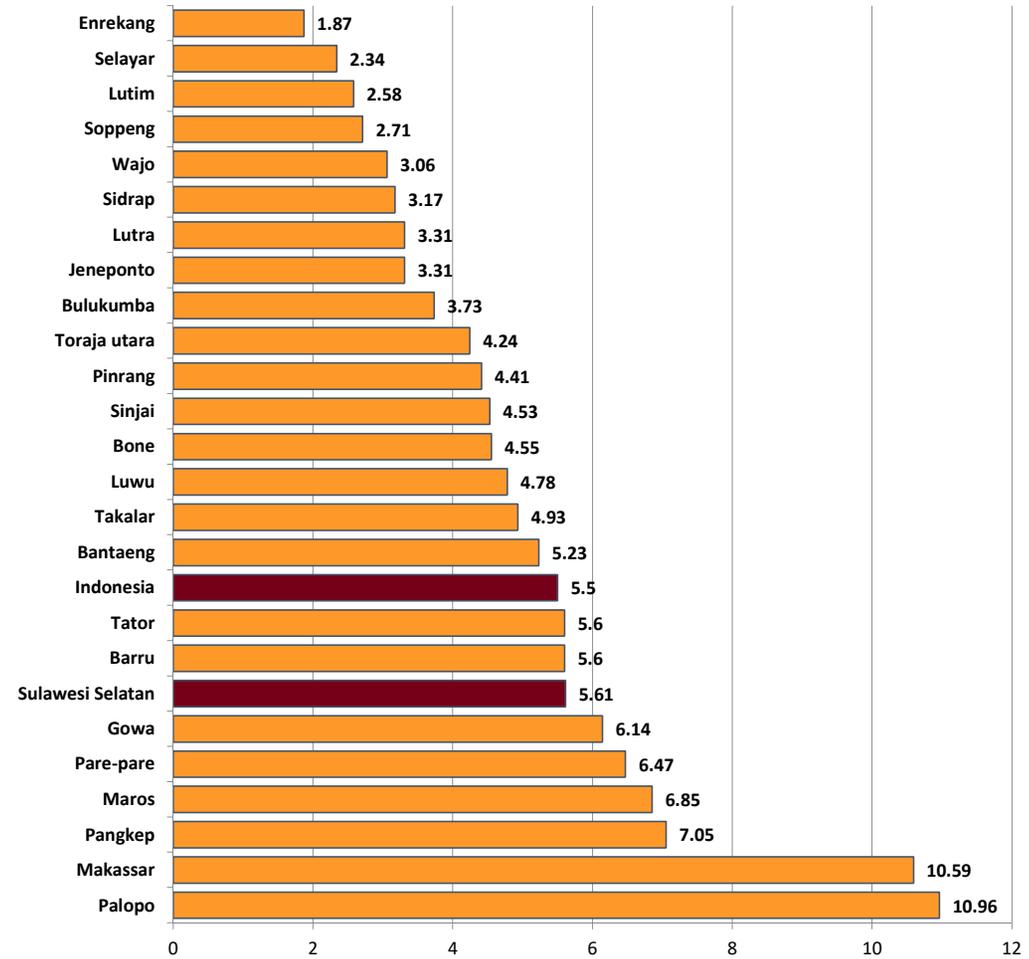
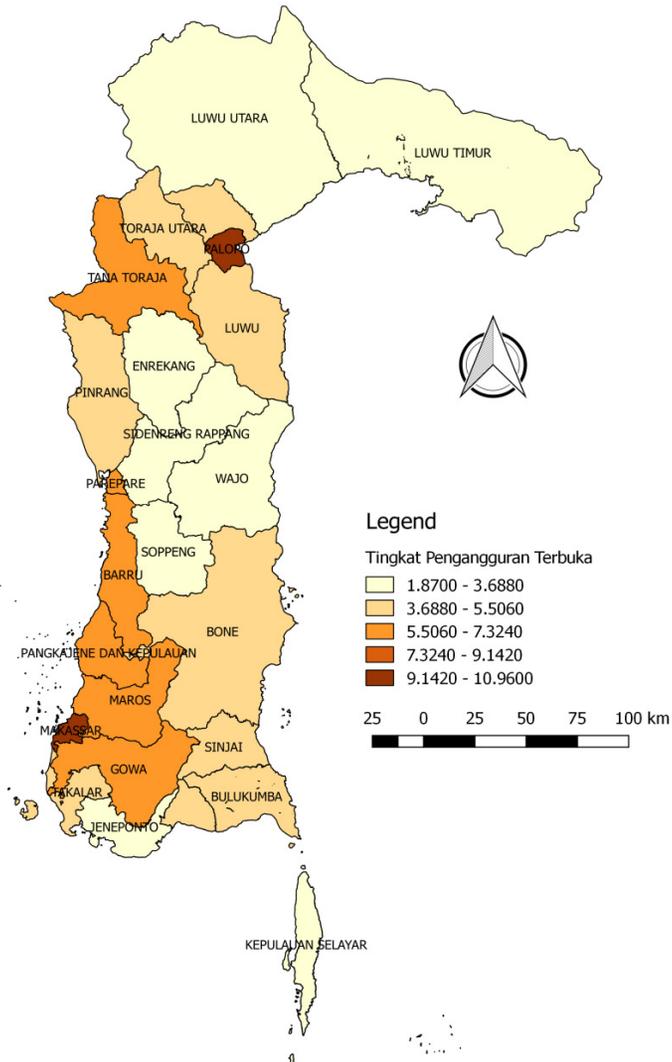


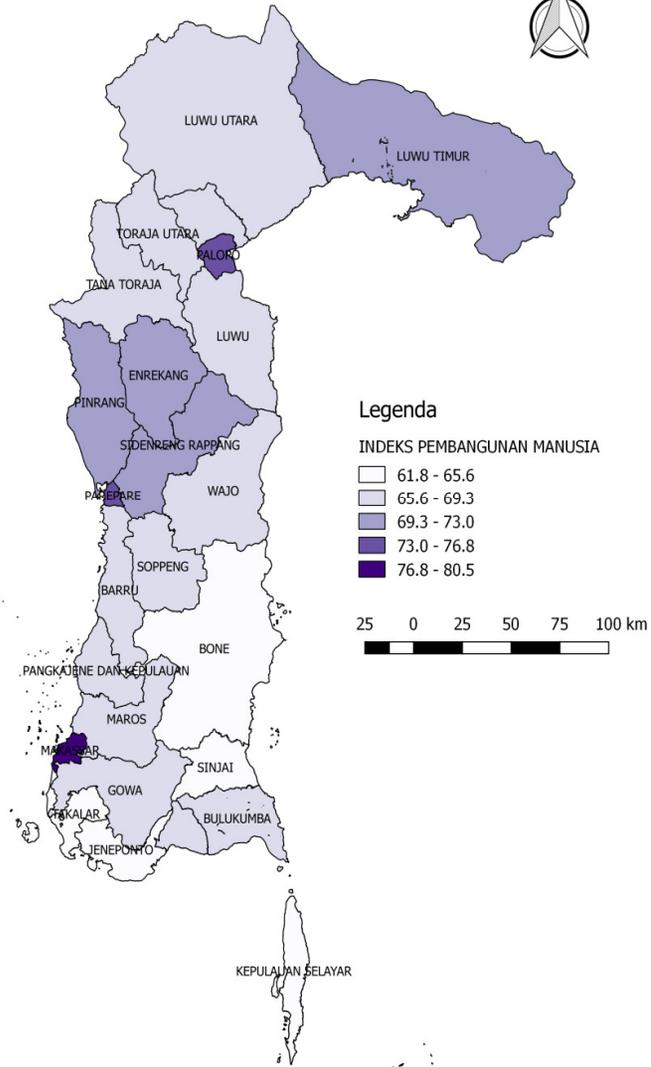
### Peta Presentase Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan 2017



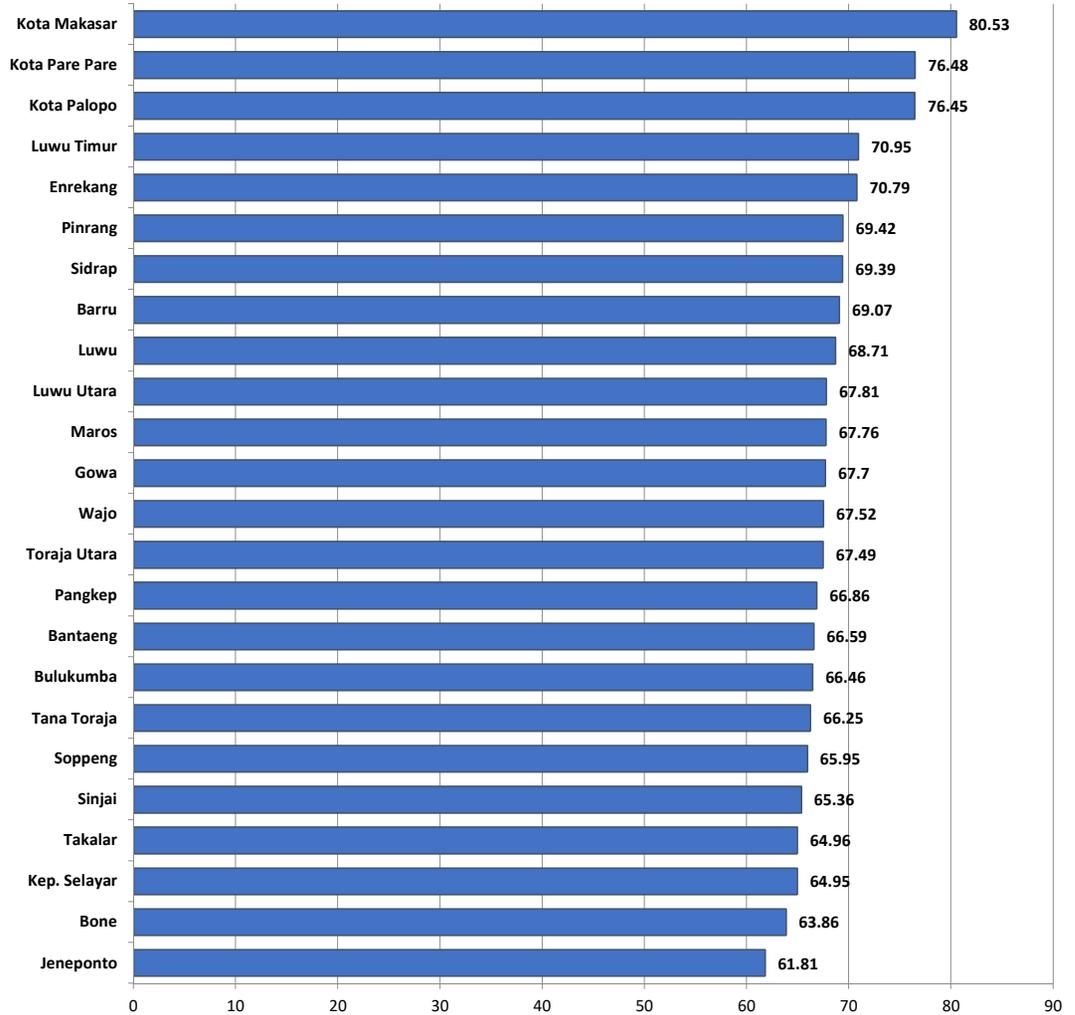


## Peta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Sulawesi Selatan 2017





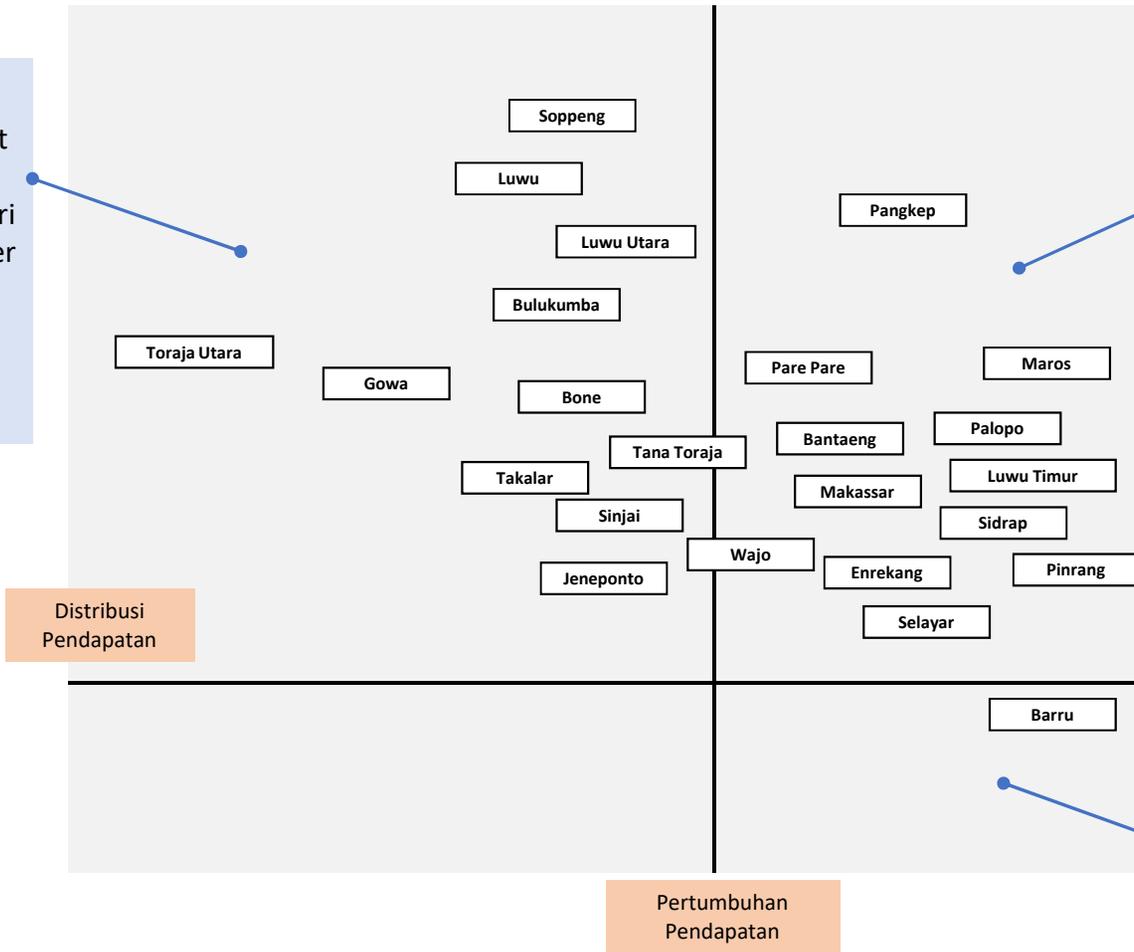
## Rank IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan 2016





### Matriks Inklusifitas (2011 – 2014)

Daerah-daerah tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan positif dari pendapatan rata-rata per kapita rumah tangga namun mengorbankan distribusi pendapatan.



Kabupaten/kota dalam kuadran ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang inklusif secara tidak ambigu.

Distribusi pendapatan pada kabupaten tersebut telah tercapai, tetapi pendapatan rata-rata menjadi korban

Sumber: Azwar Iskandar, Jurnal BPPK 2016



## Poverty-Equivalent Growth Rate (PEGR)

$$IGP_{pit} = \alpha_1 PDRB_{it} + \alpha_2 PGR_{it} + \alpha_3 KSH_{it} + \alpha_4 PDD_{it} + \alpha_5 BDR_{it} + \alpha_6 MSK_{it} + \varepsilon$$

dimana :

- $IGP_{pit}$  : Koefisien atau indeks pertumbuhan inklusif untuk kemiskinan di kabupaten/kota  $i$  pada waktu  $t$
- $PDRB_{it}$  : Pertumbuhan ekonomi (PDRB) kabupaten/kota  $i$  pada waktu  $t$
- $PGR_{it}$  : Jumlah pengangguran di kabupaten/kota  $i$  pada waktu  $t$
- $KSH_{it}$  : Indeks kesehatan di kabupaten/kota  $i$  pada waktu  $t$
- $PDD_{it}$  : Pendidikan di kabupaten/kota  $i$  pada waktu  $t$
- $BDR_{it}$  : Belanja Daerah di kabupaten/kota  $i$  pada waktu  $t$
- $MSK_{it}$  : Jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota  $i$  pada waktu  $t$
- $\alpha_{1,2,3,4,5,6}$  : Koefisien regresi faktor 1,2,3,4,5 dan 6
- $\varepsilon$  : Error

Pertumbuhan ekonomi dikatakan inklusif apabila koefisien inklusifitas pertumbuhan terhadap kemiskinan ( $IGp$ ) memiliki nilai yang lebih besar dari pertumbuhan ekonomi ( $Gg$ ) atau  $IGp > Gg$

Kabupaten	2011		2012	
	IGp	Gg	IGp	Gg
Bantaeng	0.39	0.08	0.14	0.08
Barru	0.21	0.09	0.01	0.09
Bone	0.03	0.08	-0.02	0.08
Bulukumba	0.19	0.06	0.11	0.16
Enrekang	-0.01	0.06	0.01	0.09
Gowa	-0.14	0.07	0.06	0.07
Jeneponto	0.04	0.07	0.07	0.08
Luwu	-0.27	0.08	0.23	0.07
Luwu Timur	0.66	0.08	0.07	0.07
Luwu Utara	0.05	-0.05	0.26	0.06
Makassar	0.98	0.07	0.10	0.07
Maros	0.55	0.10	-0.03	0.09
Palopo	0.49	0.10	0.01	0.11
Pangkep	0.03	0.07	0.21	0.07
Parepare	0.52	0.09	0.04	0.08
Pinrang	0.47	0.08	0.02	0.09
Selayar	0.34	0.68	0.02	0.08
Sidrap	0.54	0.09	0.06	0.08
Sinjai	0.01	0.07	0.06	0.07
Soppeng	-0.25	0.07	0.12	0.07
Takalar	-0.04	0.07	0.14	0.07
Tana Toraja	-0.61	0.07	0.15	0.09
Toraja Utara	-0.25	0.08	0.07	0.09
Wajo	0.17	0.09	0.13	0.06
<b>SULSEL</b>	<b>0.17</b>	<b>0.15</b>	<b>0.09</b>	<b>0.14</b>

Kabupaten	2013		2014	
	IGp	Gg	IGp	Gg
Bantaeng	-0.12	0.09	0.27	0.09
Barru	-0.05	0.09	0.02	0.07
Bone	-0.01	0.07	0.20	0.07
Bulukumba	0.10	-0.02	0.20	0.09
Enrekang	0.21	0.07	-0.04	0.08
Gowa	0.05	0.06	0.24	0.06
Jeneponto	-0.11	0.09	0.22	0.07
Luwu	-0.02	0.06	0.31	0.08
Luwu Timur	0.03	0.07	0.10	0.08
Luwu Utara	0.01	1.86	0.20	-1.72
Makassar	0.03	0.07	0.05	0.08
Maros	0.15	0.08	0.12	0.07
Palopo	0.08	0.06	0.21	0.05
Pangkep	0.24	0.08	0.04	0.06
Parepare	0.06	0.09	0.25	0.09
Pinrang	0.05	0.07	0.10	0.06
Selayar	-0.07	0.07	0.14	0.08
Sidrap	-0.01	0.07	0.14	0.08
Sinjai	0.07	0.08	0.10	0.06
Soppeng	0.05	0.07	0.37	0.06
Takalar	-0.11	0.08	0.19	0.09
Tana Toraja	-0.18	0.07	0.24	0.06
Toraja Utara	0.09	0.09	0.22	0.07
Wajo	-0.05	0.07	0.11	0.09
<b>SULSEL</b>	<b>0.15</b>	<b>0.19</b>	<b>0.15</b>	<b>0.09</b>

Sumber: Azwar Iskandar, Jurnal BPPK 2016



Kategori Inklusif dan Tidak Inklusif  
Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan  
Tahun 2011 – 2014

Kabupaten	2011	2012	2013	2014
Bantaeng	Inklusif	Inklusif	Tidak Inklusif	Inklusif
Barru	Inklusif	Tidak Inklusif	Tidak Inklusif	Tidak Inklusif
Bone	Tidak Inklusif	Tidak Inklusif	Tidak Inklusif	Inklusif
Bulukumba	Inklusif	Tidak Inklusif	Inklusif	Inklusif
Enrekang	Tidak Inklusif	Tidak Inklusif	Inklusif	Tidak Inklusif
Gowa	Tidak Inklusif	Tidak Inklusif	Tidak Inklusif	Inklusif
Jeneponto	Tidak Inklusif	Tidak Inklusif	Tidak Inklusif	Inklusif
Luwu	Tidak Inklusif	Inklusif	Tidak Inklusif	Inklusif
Luwu Timur	Inklusif	Tidak Inklusif	Tidak Inklusif	Inklusif
Luwu Utara	Inklusif	Inklusif	Tidak Inklusif	Inklusif
Makassar	Inklusif	Inklusif	Tidak Inklusif	Tidak Inklusif
Maros	Inklusif	Tidak Inklusif	Inklusif	Inklusif
Palopo	Inklusif	Tidak Inklusif	Inklusif	Inklusif

Kategori Inklusif dan Tidak Inklusif  
Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan  
Tahun 2011 – 2014

Kabupaten	2011	2012	2013	2014
Pangkep	Tidak Inklusif	Inklusif	Inklusif	Tidak Inklusif
Parepare	Inklusif	Tidak Inklusif	Tidak Inklusif	Inklusif
Pinrang	Inklusif	Tidak Inklusif	Tidak Inklusif	Inklusif
Selayar	Tidak Inklusif	Tidak Inklusif	Tidak Inklusif	Inklusif
Sidrap	Inklusif	Tidak Inklusif	Tidak Inklusif	Inklusif
Sinjai	Tidak Inklusif	Tidak Inklusif	Tidak Inklusif	Inklusif
Soppeng	Tidak Inklusif	Inklusif	Tidak Inklusif	Inklusif
Takalar	Tidak Inklusif	Inklusif	Tidak Inklusif	Inklusif
Tana Toraja	Tidak Inklusif	Inklusif	Tidak Inklusif	Inklusif
Toraja Utara	Tidak Inklusif	Tidak Inklusif	Tidak Inklusif	Inklusif
Wajo	Inklusif	Inklusif	Tidak Inklusif	Inklusif
<b>SULSEL</b>	<b>Inklusif</b>	<b>Tidak Inklusif</b>	<b>Tidak Inklusif</b>	<b>Inklusif</b>

Sumber : BPS (2016), hasil olah data

Sumber: Azwar Iskandar, Jurnal BPPK 2016

Koefisien inklusifitas pertumbuhan dalam menurunkan kemiskinan secara umum memiliki nilai yang fluktuatif sepanjang periode pengamatan. Jumlah kabupaten/kota yang pertumbuhannya inklusif dalam menurunkan kemiskinan jauh lebih sedikit dibanding kabupaten/kota yang pertumbuhannya tidak inklusif. Dengan kondisi demikian, pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi Selatan dapat dikatakan **tidak inklusif dalam menurunkan kemiskinan**.



# Arah Kebijakan Ekonomi

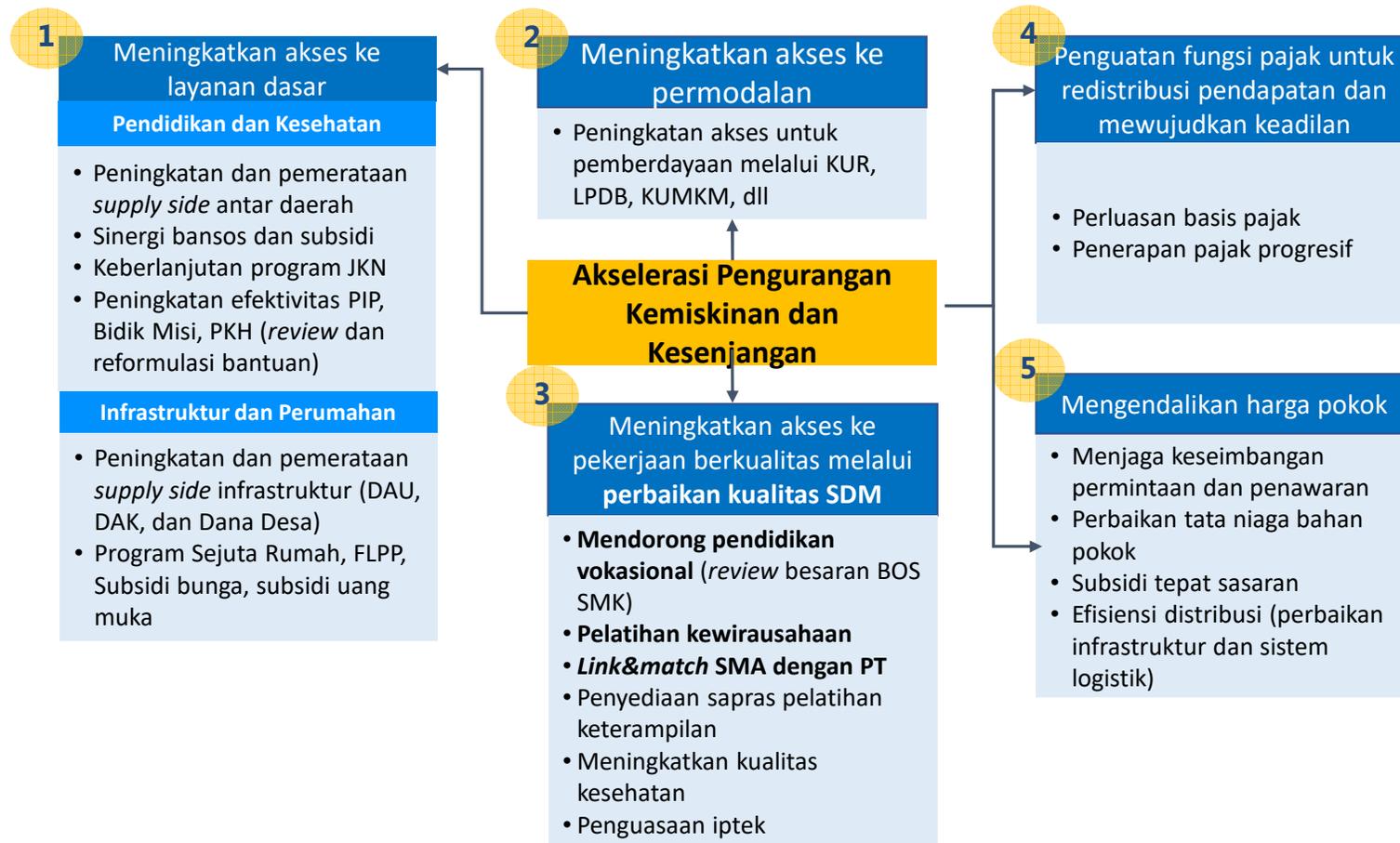


# ISU STRATEGIS KEMISKINAN DAN KESENJANGAN





# STRATEGI UNTUK MENGURANGI KEMISKINAN DAN KESENJANGAN





## PROGRAM-PROGRAM YANG DI DISAIN LEBIH TEPAT SASARAN LEBIH EFEKTIF MENURUNKAN KEMISKINAN DAN KESENJANGAN

Keterangan	Subsidi LPG	Subsidi Listrik	Subsidi Solar	Rastra	PKH	PIP
Nilai yang diterima RT (per tahun)*	Rp17,7T	Rp66,0T	Rp2,1T	Rp7,6T	Rp2,6T	Rp7,3T
Perubahan Kemiskinan (%)	-0,53	-2,59	-0,01	-0,07	-0,39	-0,58
Perubahan Gini Ratio (poin)	-0,26	-0,63	0,01	-0,17	-0,11	-0,21
Efektivitas Penurunan Kemiskinan (%/ tr Rp)	0,030	0,039	0,005	0,009	0,150	<b>0,079</b>
Efektivitas Penurunan Gini (poin / tr Rp)	0015	0,010	-0,006	0,022	0,041	<b>0,028</b>

Sumber: BKF, KEMENKEU

\*SUSENAS 2014, diolah

- PKH adalah program yang paling efektif dalam menurunkan kemiskinan dan ketimpangan. Berbagai upaya perbaikan yang dapat dilakukan guna meningkatkan efektivitas program ini.
  - Bantuan yang diberikan dalam program PKH bertujuan untuk mengurangi beban keluarga peserta untuk pendidikan dan kesehatan namun di sisi lain perlu untuk meningkatkan kemandirian keluarga miskin agar tidak selalu bergantung kepada bantuan yang diberikan oleh pemerintah.
  - **sinergi dengan program pemerintah lainnya, khususnya yang terkait pemberdayaan masyarakat dan peningkatan produktivitas menjadi sangat krusial** → memberikan akses kepada pembiayaan melalui program KUR.
  - membutuhkan adanya pelatihan dan bimbingan bagi peserta PKH agar mereka memenuhi persyaratan guna memperoleh KUR.



# **Pemberdayaan Sertipikat Hak Atas Tanah Masyarakat (SHAT)**



# KEBIJAKAN PEMERATAAN EKONOMI

Perbaiki kesejahteraan masyarakat tersebut tidak akan berkelanjutan jika tidak didukung dengan kebijakan pemerataan ekonomi



## KEBIJAKAN PEMERATAAN EKONOMI



Prioritas

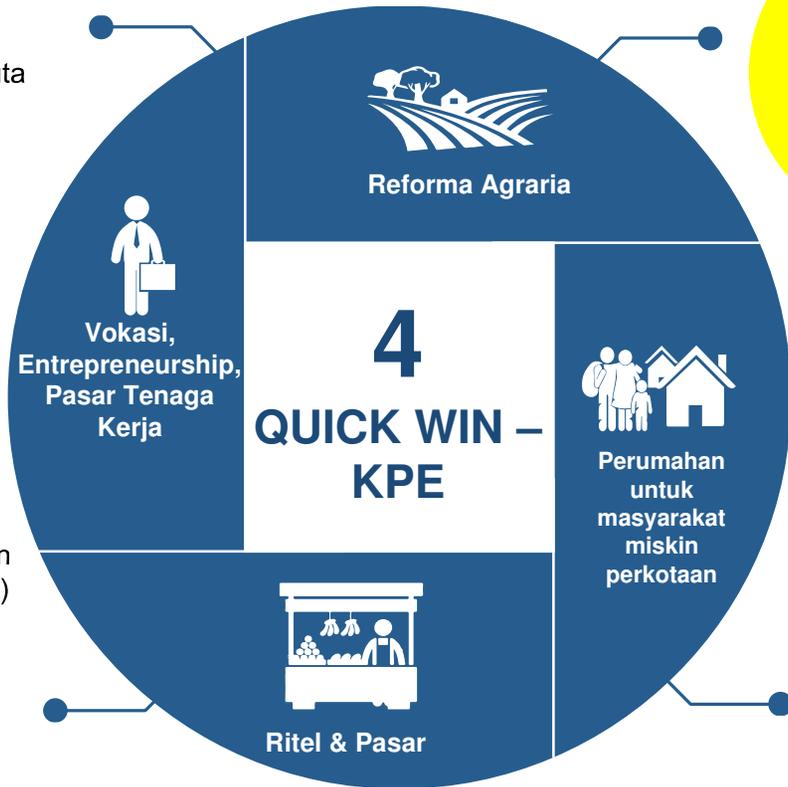


# QUICK WIN KEBIJAKAN PEMERATAAN EKONOMI

- Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tidak akan berkelanjutan karena adanya 4 faktor ketimpangan
- Pemerintah memfokuskan pada 4 program *quick win* KPE yang memiliki dampak paling besar dalam pengurangan ketimpangan di masyarakat

**Target :**  
Pengangguran ~7 juta jiwa di tahun 2016

**Target:**  
Pangsa pasar modern naik dari 25,2%(2002) – 44,2% (2011) sementara pasar tradisional semakin menyusut



**Target:**  
4,5 – 9 juta jiwa rakyat yang tidak memiliki akses terhadap lahan\*

**Target:**  
13.5 Juta KK yang tidak memiliki hunian. Fokus pada 10 kota megapolitan

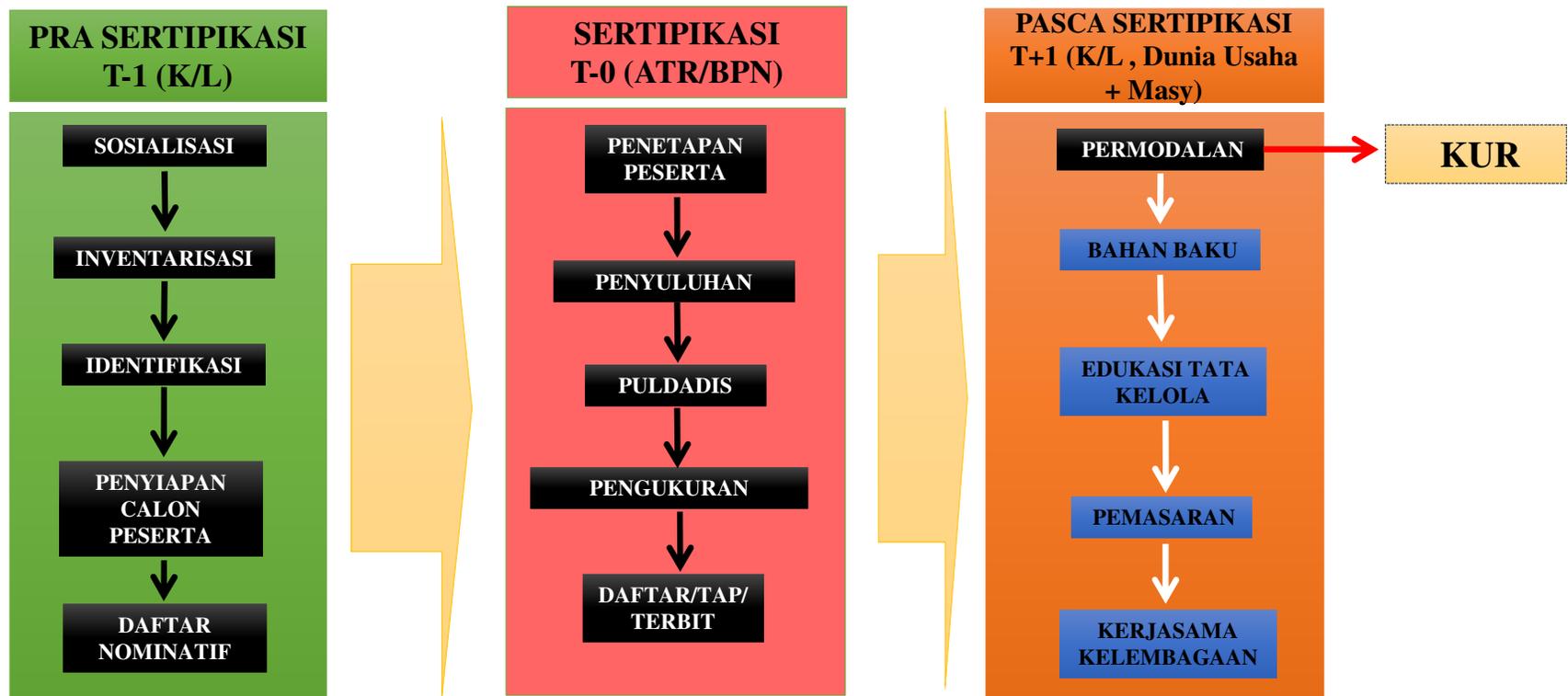
## 4 Faktor Ketimpangan





## KOORDINASI ANTAR PIHAK

Kerja Sama Percepatan Pemberdayaan bagi UMK, Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan, dengan tahapan sbb. :





## SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH

“Kemenko Perekonomian mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Nota Kesepahaman/MoU Tentang Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat Bagi Usaha Mikro dan Kecil, Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan melalui Sertipikasi Hak Atas Tanah (SHAT) pada tingkat teknis”

Leading Sector



Kementerian teknis pra sertipikasi dan pasca sertipikasi





# POKJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PRA SERTIPIKASI, SERTIPIKASI DAN PASCA SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH **LINTAS SEKTOR PROVINSI**

**KETUA**  
Kepala Kantor Wilayah BPN  
di masing-masing provinsi

**WAKIL KETUA**  
Kepala Dinas/Pejabat yang membidangi pertanian, kelautan dan perikanan, dan/atau koperasi dan UKM yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah di masing-masing provinsi

**SEKRETARIS**  
Kepala Bidang Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di masing-masing provinsi

Kepala Dinas yang membidangi koperasi, usaha kecil dan menengah

Kepala Dinas yang membidangi Pertanian (subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan)

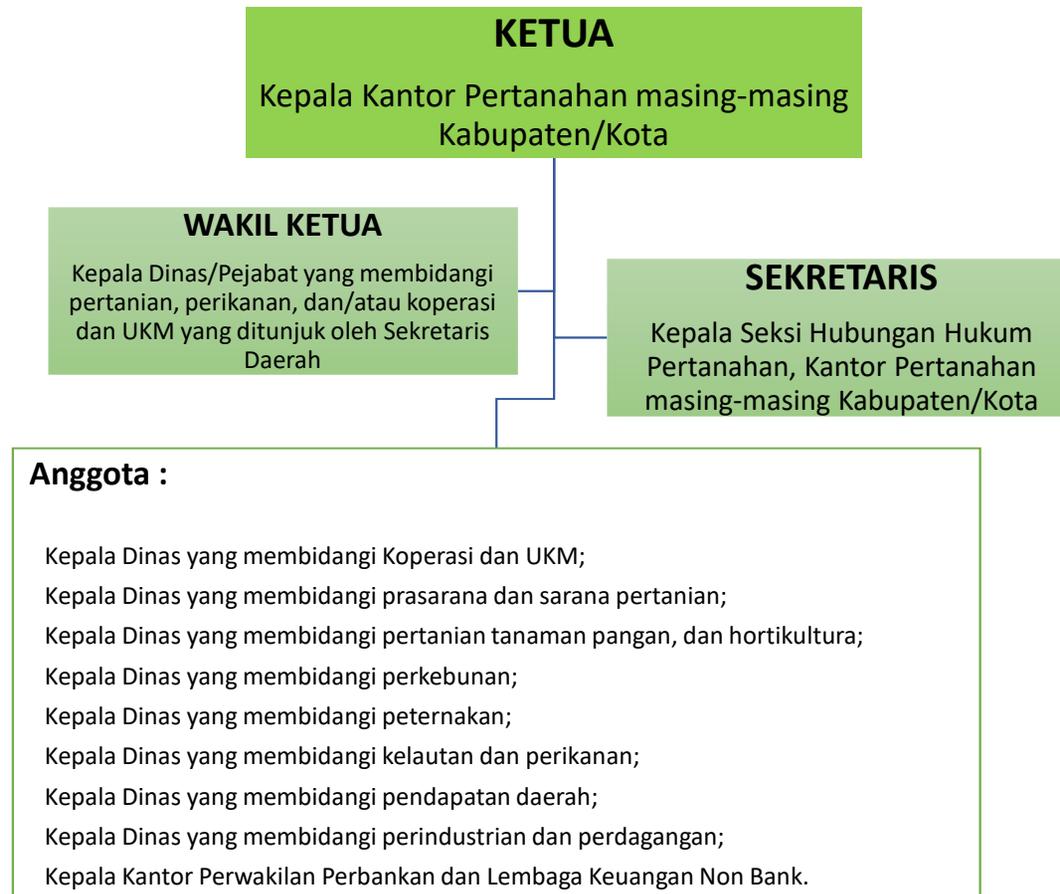
Kepala Dinas yang membidangi kelautan dan perikanan

Asisten Sekretariat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat

Kepala Kantor Perwakilan Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank

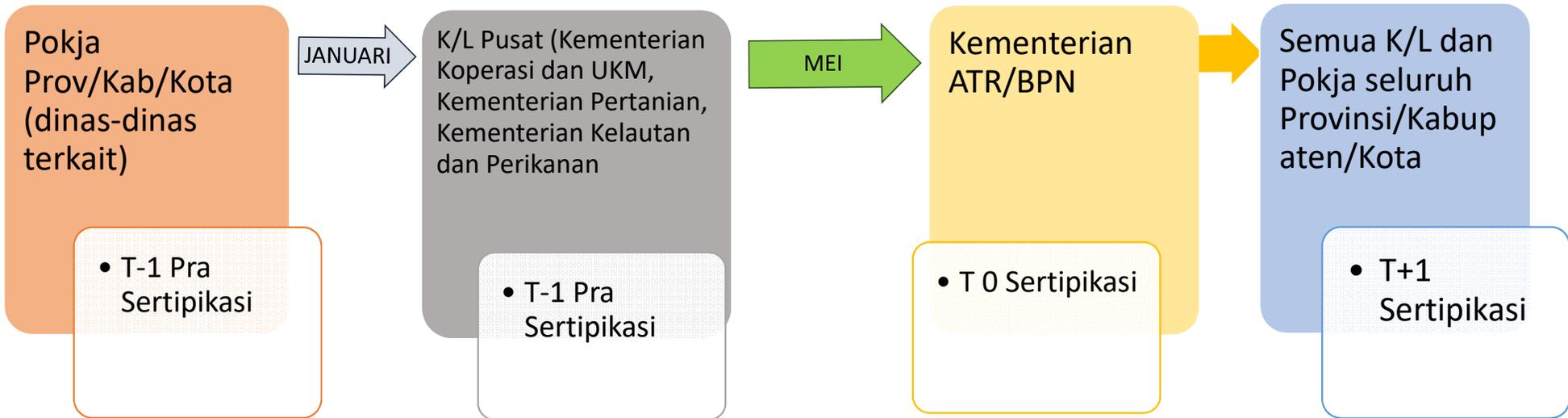


## POKJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PRA SERTIPIKASI, SERTIPIKASI DAN PASCA SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH **LINTAS SEKTOR KABUPATEN/KOTA**





## PENYIAPAN CALON PENERIMA/ CALON LOKASI (CP/CL)



Tugas Pokja pemberdayaan masyarakat di Kabupaten/Kota pada T-1 (Pra Sertifikasi)

seleksi CP/CL (sesuai dengan lokasi yg disepakati antara SKPD dan Kantah Kab/Kota) oleh dinas/instansi terkait dan menyampaikan ke kantah kabupaten/kota paling lambat bulan **JANUARI** tahun anggaran berjalan (T0), tembusan kepada kementerian terkait dan Kanwil BPN Prov

Note:

Tugas K/L di Pusat dalam T-1 (Pra Sertifikasi)

menyampaikan usulan CP/CL dan jumlah bidang tanah kegiatan sertifikasi hak atas tanah yang diperoleh dari SKPD Prov dan atau Kab/Kota seluruh Indonesia berdasarkan hasil identifikasi, inventarisasi dan verifikasi (sesuai dengan lokasi yang telah disepakati bersama antara Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD Prov dan Kab/Kota dengan Kanwil BPN Provinsi dan KantahKab/Kota), kepada Kementerian ATR/BPN paling lambat bulan **MEI**, untuk ditetapkan dalam kegiatan di tahun anggaran berikutnya



## PERAN PARA PIHAK

### BPN

- Menyusun Pedum Pra Sertifikasi dan Sertifikasi
- Menerima daftar usulan CP/CI
- Menentukan target sertifikat per kabupaten
- Menentukan jumlah bidang tanah yang akan disertifikasi
- Mengirimkan daftar penerima sertifikat kepada kantor wilayah pertanahan provinsi

T-1 & T0

### Kemenkop UKM, Kementan & KKP

- Koordinasi dengan dinas di kabupaten untuk penentuan CP/CL
- Menyediakan anggaran untuk kegiatan pra sertifikasi
- Menyetor data CP/CI pada bulan Mei setiap tahunnya
- Membuat petunjuk teknis pra sertifikasi
- Membuat laporan pra sertifikasi

### Kemendagri

Memfasilitasi urusan pemerintah daerah terkait kegiatan pra sertifikasi dan sertifikasi

### BPN

- Menyusun rencana pemberdayaan di kantor wilayah pertanahan
- Menyusun pedoman pemberdayaan di kantor wilayah pertanahan
- Fasilitasi pemda untuk berperan membuka akses ke sumber ekonomi, produksi, dan pasar dalam pemberdayaan
- Menyediakan data pemberdayaan pasca sertifikasi
- Monitoring pemberdayaan

T+1

### Kemenkop UKM, Kementan & KKP

- Melakukan inventarisasi data potensi pemberdayaan
- Monitoring pemberdayaan
- Sosialisasi untuk pemda di bidang terkait untuk pemberdayaan pasca sertifikasi
- Fasilitasi kelompok pemberdayaan untuk pembentukan koperasi (khusus Kemenkop)

### Kemendagri

Koordinasi dengan pemda terkait kegiatan paca sertifikasi



## **STUDI KASUS : PEMBERDAYAAN SHAT DI KAB. ACEH TIMUR DAN KOTA LANGSA, PROV. ACEH (1)**

- Proses pelaksanaan pasca sertipikasi Kab Langsa didahului dengan pelaksanaan pemetaan sosial (inventarisasi dan identifikasi potensi usaha apa saja yang dapat atau usaha yang sedang dan sudah dijalankan) di lokasi program pemberdayaan
- Pemetaan sosial dibantu oleh POKMASDARTIBNAH (Kelompok Masyarakat Sadar dan Tertib Pertanian) yakni mitra kerja desa yang bersama-sama melakukan pemberdayaan masyarakat melalui usaha mandiri dengan memanfaatkan sertipikat lahan melalui program pasca sertipikasi.
- Keberadaan program pasca sertipikasi yang ada sangat membantu menghidupkan perekonomian rakyat di Aceh, khususnya Gampong (Kampung) Matang Glem, Kabupaten Aceh Timur.
- Kegiatan pemberdayaan yang ada di desa tersebut berupa kerajinan anyaman di Koperasi Kelompok Bungong Sireh di gerakkan oleh aparat desa dan kelompok ibu-ibu PKK.
- Hasil kerajinan anyaman di kampung tersebut merambah pasar internasional hingga di ekspor ke Beijing, Cina. Hasil yang baik ini menjadikan Gampong Matang Glem dijadikan salah satu kampung percontohan pemberdayaan pasca sertipikasi di Kabupaten Aceh Timur.
- Sertipikat tanah dijadikan jaminan untuk memperoleh modal usaha sebesar 20 juta di Bank Mandiri untuk pengembangan usaha Kelompok Bungong Sireh.
- Kendala yang dihadapi adalah kurangnya pembinaan yang intensif dan mendalam sehingga kelompok tersebut masih menunggak selama 4 bulan untuk membayar cicilan karena terdapat anggota kelompok yang berpisah dengan kelompok inti, dan membentuk kelompok baru, sedangkan kelompok baru tersebut masih meminjam dana dari kelompok yang lama.



## STUDI KASUS : PEMBERDAYAAN SHAT DI KAB. ACEH TIMUR DAN KOTA LANGSA, PROV. ACEH (2)

- Lokasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pasca sertifikasi di Kota Langsa dilaksanakan salah satunya di Desa Karang Anyar (*pilot project*), Kecamatan Langsa Baro, karena di desa tersebut 90% telah bersertipikat dan masyarakat setempat banyak yang memiliki usaha berdikari.
- Kegiatan pemberdayaan masyarakat pasca sertifikasi dilaksanakan dalam tiga kelompok usaha yaitu kelompok pembuat keripik, kelompok ternak kambing, dan kelompok ternak lele. Adapun kendala dari masing-masing kelompok:
  - 1) Kelompok pembuat keripik banyak menemui kendala dengan keterbatasan peralatan produksi yang ada serta kesulitan dalam pengemasan dan pemasaran hasil usaha.
  - 2) Kelompok ternak lele mengalami kesulitan dengan tingginya harga pakan ternak serta kesulitan mendapatkan bibit yang unggul.
  - 3) Kelompok ternak kambing lebih kepada bibit dan modal usaha untuk menambah kandang serta belum ada usaha lain selain hanya beternak dan menjual kambingnya saja.





# KREDIT USAHA RAKYAT



## PERKEMBANGAN KINERJA KUR Posisi 31 Maret 2018

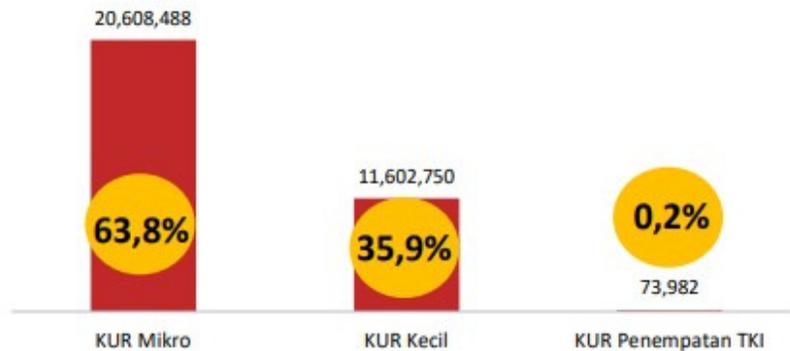
Realisasi penyaluran KUR sampai dengan 31 Maret 2018 sebesar Rp 32,3 T (27.6% dari target penyaluran Rp 116,6 T), dgn NPL 0,00% Penyaluran KUR masih didominasi untuk skema KUR Mikro (63,8%) diikuti dengan skema KUR Kecil (35,9%) dan KUR TKI (0,2%). Kinerja ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pemerataan akses pembiayaan untuk usaha kecil.

Plafon, outstanding, dan nominal NPL dalam Rp juta

No	Penyalur	Total Penyaluran KUR				
		Plafon	Outstanding	Jml. Debitur	Rasio NPL	Nominal NPL
1	PT. BRI (Persero)	22,412,384	21,613,745	1,106,072	0.00%	-
2	PT. Bank Mandiri (Persero)	3,547,341	3,477,794	58,165	0.00%	-
3	PT. BNI (Persero)	4,875,518	4,580,748	29,348	0.00%	-
4	PT. BTN (Persero)	5,642	5,596	22	0.00%	-
5	Bank Umum Swasta	393,156	383,426	14,791	0.00%	-
6	Bank Pembangunan Daerah	1,050,819	1,032,901	10,312	0.00%	-
7	Perusahaan Pembiayaan	360	346	29	0.00%	-
8	Koperasi	-	-	-	0.00%	-
Total		32,285,220	31,094,556	1,218,739	0.00%	-

### Penyaluran KUR s.d 31 Maret 2018 Berdasarkan Skema

Plafon dalam Rp juta



### Realisasi Penyaluran KUR



### NPL

**0,00 %**

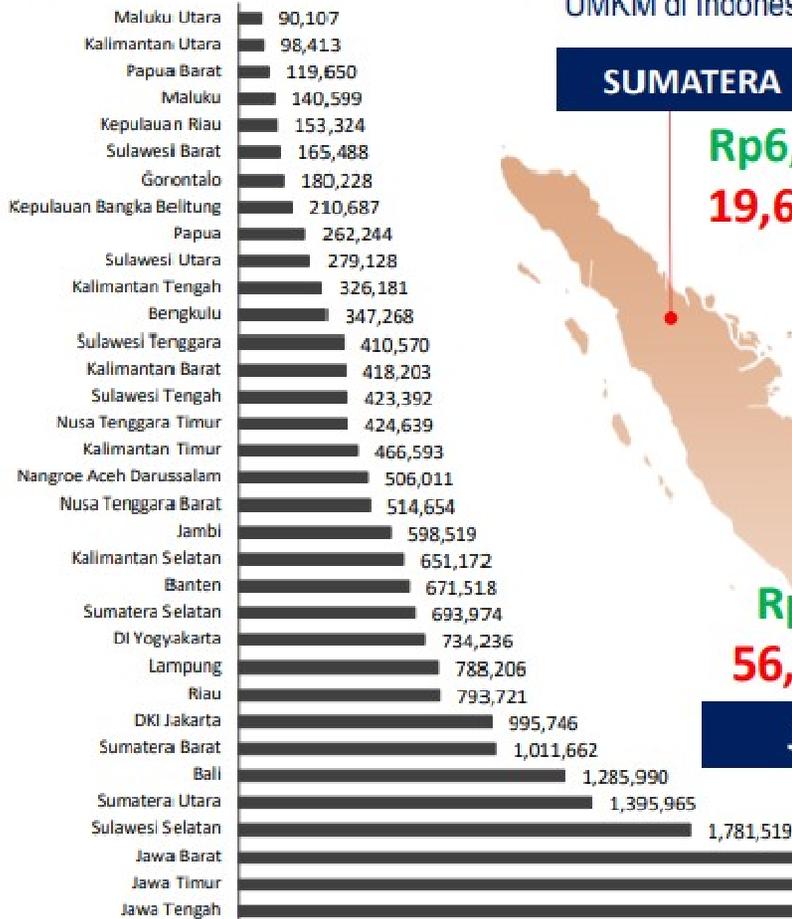
### Debitur

**1,218,739**

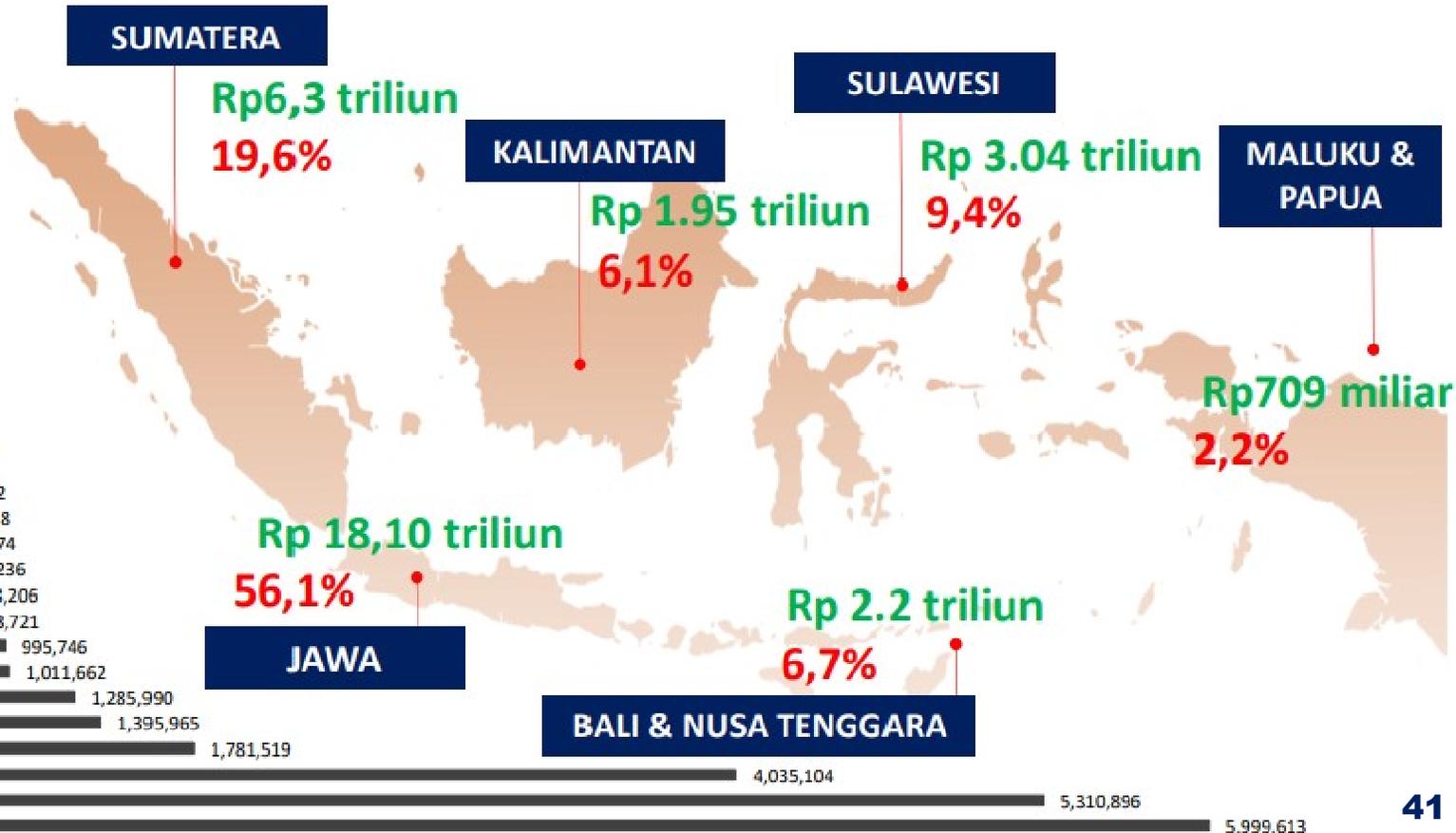


# PENYALURAN KUR MENURUT WILAYAH Posisi 31 Maret 2018

## Menurut Provinsi (Rp Triliun)



Penyaluran KUR didominasi di Pulau Jawa, dengan porsi penyaluran sebesar 56,1%, diikuti dengan Sumatera 19,6% dan Sulawesi 9,4%. Kinerja penyaluran KUR per provinsi tersebut sesuai dengan sebaran UMKM di Indonesia.





## PENYALURAN KUR MENURUT SEKTOR EKONOMI

Penyaluran KUR untuk sektor produksi terus berjalan (*target porsi penyaluran KUR sektor produksi tahun 2018 sebesar 50%*).

Sampai dengan 31 Maret 2018 tercatat porsi penyaluran KUR **sektor produksi (pertanian, perikanan, industri, konstruksi, dan jasa - jasa)** sebesar **37.6 persen** sedangkan **sektor produksi tanpa jasa** (pertanian, perikanan, industri, konstruksi) sebesar **28.1 persen**.

### Porsi Penyaluran KUR Menurut Sektor (%)



No	Sektor Ekonomi	KUR Mikro				KUR Kecil				Total			
		Desember 2017		Maret 2018		Desember 2017		Maret 2018		Desember 2017		Maret 2018	
		Rp Triliun	%	Rp Triliun	%	Rp Triliun	%	Rp Triliun	%	Rp Triliun	%	Rp Triliun	%
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	16.8	25.7	4.9	24	6.3	20.3	1.8	15.88	23	23.9	6.8	21.1
2	Perikanan	1.02	1.6	0.33	1.6	0.05	1.8	0.14	1.2	1.6	1.6	0.47	1.5
3	Industri Pengolahan	2.8	4.3	0.88	4.3	2.6	8.4	0.64	5.51	5.4	5.6	1.52	4.7
4	Perdagangan	37.8	57.7	12.4	60	17.99	57.6	7.6	65.40	55.8	57.7	20	62
5	Konstruksi	0.0001	0.002	0.006	0.03	0.0051	0.2	0.03	0.23	0.0053	0.05	0.03	0.1
6	Jasa-jasa*	7.03	10.7	2,08	10.1	3.6	11.6	1.4	11.77	10.6	11	3.5	11
	<b>Total</b>	<b>65.5</b>	<b>100</b>	<b>12.8</b>	<b>100</b>	<b>31.2</b>	<b>100</b>	<b>6.8</b>	<b>100</b>	<b>96.7</b>	<b>100</b>	<b>19.5</b>	<b>100</b>

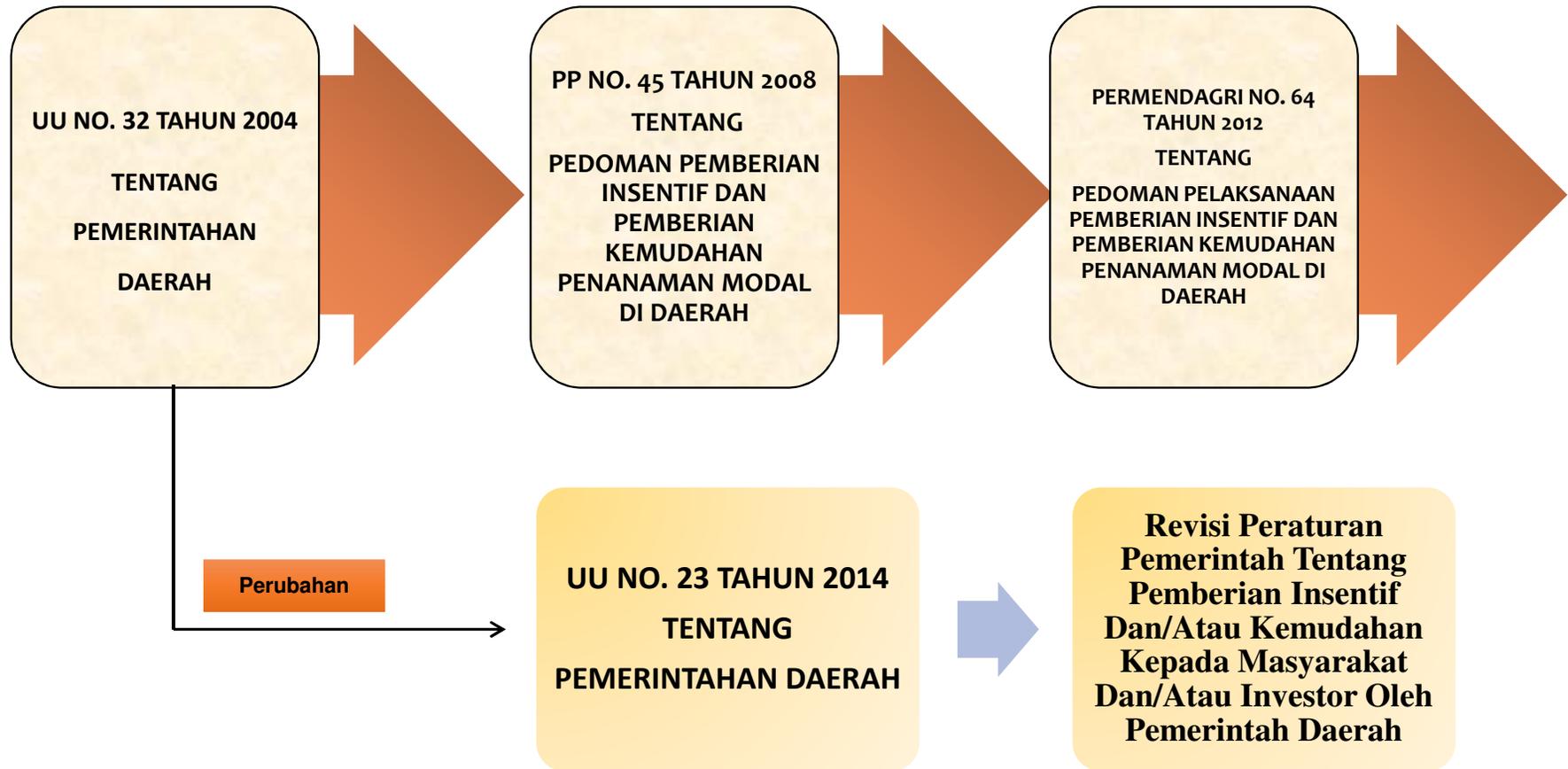
\*) Jasa-jasa = Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; Transportasi; Real estate; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan; Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya (TKI).



# Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi



## LATAR BALAKANG PEMBERIAN INSENTIF

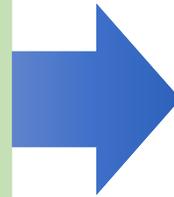




## DUKUNGAN DAERAH: RPP INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH

### UU NO. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 278

Penyelenggara Pemda melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah dan dapat memberikan insentif dan/atau investor yang diatur dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan



### Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah

#### Latar Belakang:

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 perlu disesuaikan dengan dinamika perekonomian

#### Maksud dan Tujuan RPP Insentif:

1. Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah, pemerintahan daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor.
2. Sebagai payung hukum pemerintah daerah dalam memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor.

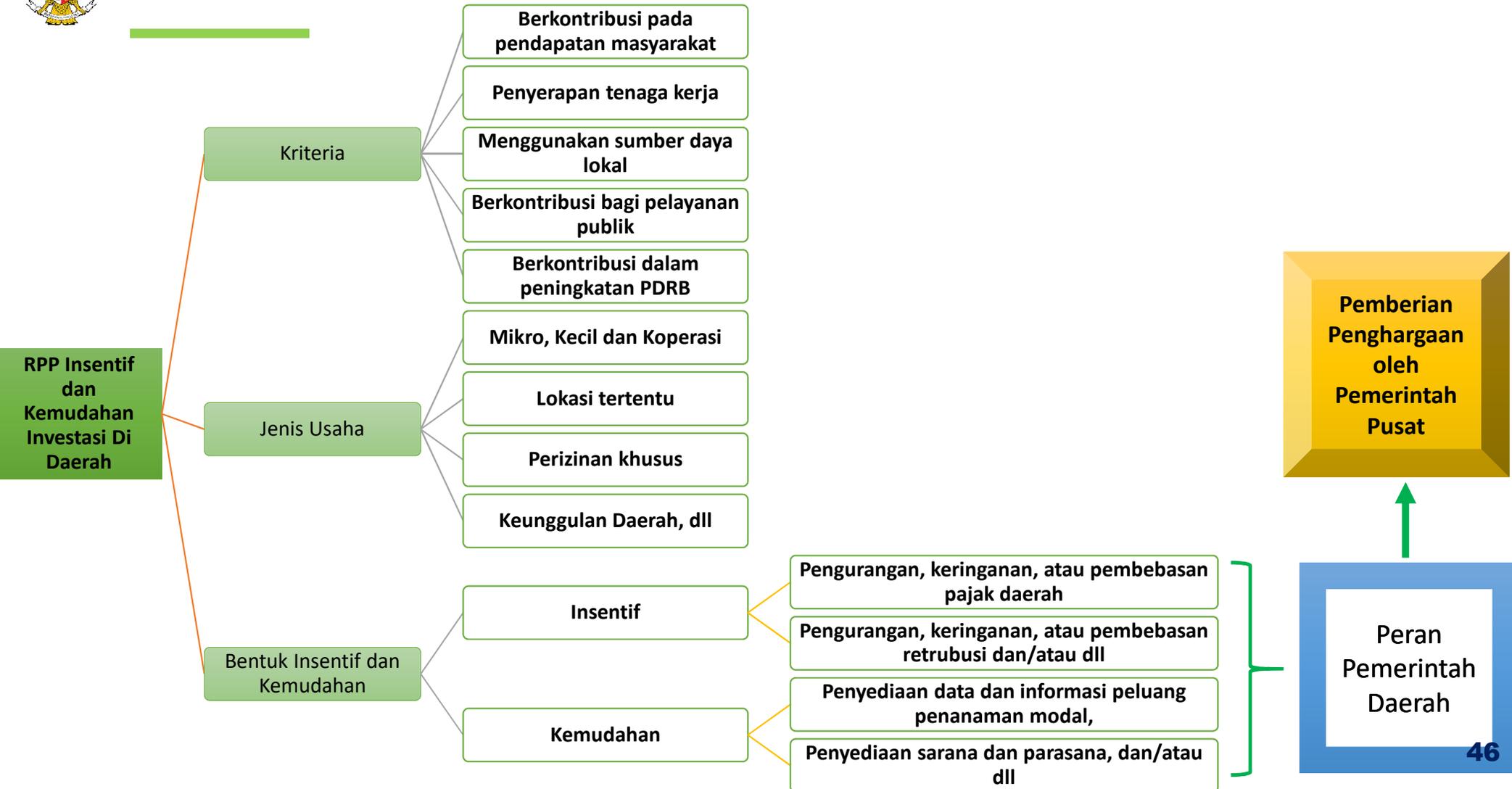
#### Isu Strategis :

1. Kemampuan kapasitas fiskal daerah
2. Inovasi dan kreatifitas daerah di dalam meningkatkan investasi





# POKOK SUBSTANSI RPP INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH





## Studi Kasus : Peraturan Penanaman Modal Kabupaten Wonogiri

Perda Kabupaten Wonogiri No 14 Th 2011 ttg Penanaman Modal di Kabupaten Wonogiri



Perbup Wonogiri No 71 Th 2013 ttg Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Wonogiri Th 2013-2025

Perbup Wonogiri No 7 Th 2014 ttg Penyelenggaraan pelayanan Penanaman Modal

Perbup Wonogiri No 70 Th 2014 ttg Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan pada Usaha Mikro dan Kecil

### **MISI:**

1. Menciptakan iklim investasi kondusif;
2. Mewujudkan infrastruktur penanaman modal yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas;
3. Menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha;
4. Mewujudkan kemitraan yang seimbang antara usaha besar, menengah, kecil dan mikro;
5. Mewujudkan pemanfaatan potensi sumber daya lokal;
6. Mendorong tumbuhnya kewirausahaan masyarakat.



## BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN UMKM DI KABUPATEN WONOGIRI

BENTUK USAHA	INSENTIF	KEMUDAHAN
<b>Usaha Mikro Kecil</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembebasan retribusi daerah untuk IMB dan Ho untuk usaha mikro; atau</li><li>• Pemberian keringanan retribusi daerah (10% - 90%) untuk IMB dan Ho.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fasilitas Wonogiri Business Forum;</li><li>• Fasilitas Kemitraan Usaha;</li><li>• Fasilitas Promosi Investasi;</li><li>• Fasilitas Data Potensi Investasi;</li><li>• Fasilitas kemudahan perizinan;</li><li>• Fasilitas informasi lokasi usaha; dan</li><li>• Fasilitas penyediaan infrastruktur</li></ul>
<b>Usaha Menengah dan Besar</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fasilitas Wonogiri Business Forum;</li><li>• Fasilitas kemitraan usaha; dan</li><li>• Fasilitas promosi investasi.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fasilitas Data Potensi Investasi;</li><li>• Fasilitas kemudahan perizinan;</li></ul>



# Kerja Sama Daerah



## RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH KERJA SAMA DAERAH

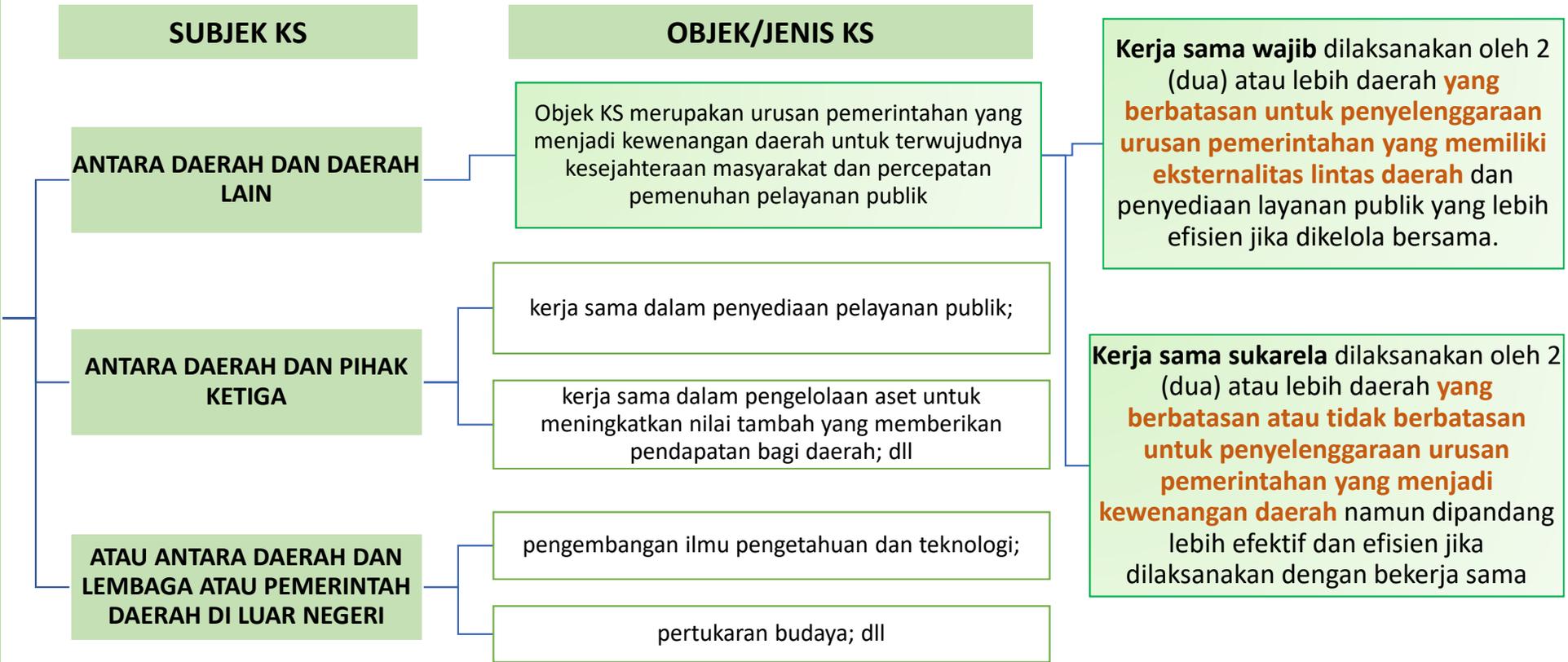


- Amanat dari Pasal 369 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diamanatkan kerja sama diatur oleh Peraturan Pemerintah
- RPP ini disusun dengan 3 (tiga) ruang lingkup pengaturan yaitu Kerja Sama Daerah dengan Daerah, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga/Pemerintah Daerah di Luar Negeri.
- RPP Kerja Sama Daerah ini adalah revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 yang sudah tidak relevan dengan Peraturan Per-UU yang ada.
- RPP Kerja sama sudah disusun sejak tahun 2015
- Draft RPP Kerja Sama Daerah sudah melalui pembahasan antar K/L dengan leading adalah Kemendagri dan sudah diharmonisasikan beberapa kali dengan K/L terkait di Kemenkumham.
- RPP Kerja Sama Daerah hingga saat ini sudah diparaf koordinasi oleh Mendagri, Menteri Hukum dan HAM, Menkeu, Menteri PPN/Bappenas, Menteri Pan RB, Menteri PUPERA, Menlu, dan Kemenko Perekonomian



# SUBJEK dan OBJEK RPP KERJA SAMA DAERAH

KSD





## Studi Kasus : Peraturan KSD di Kab. Badung

Perda No. 3/2015

tentang KSD

### Kesepakatan Bersama

tentang Bantuan Keuangan yg Bersumber dari Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung Kepada Daerah-daerah Di Provinsi Bali

Subjek

Kab. Badung, Kab. Buleleng, Kab. Jembrana, Kab. Tabanan, Kab. Bangli, Kab. Klungkung, Kab. Karang Asem

Maksud dan Tujuan

Maksud : menjalin kemitraan dan menciptakan keterpaduan antar daerah dalam mewujudkan sinergitas pembangunan pariwisata Bali

Tujuan : Pemerataan dan percepatan pembangunan antar kabupaten di Bali

Ruang Lingkup

Bantuan keuangan hasil pajak hotel dan pajak resto Kab. Badung

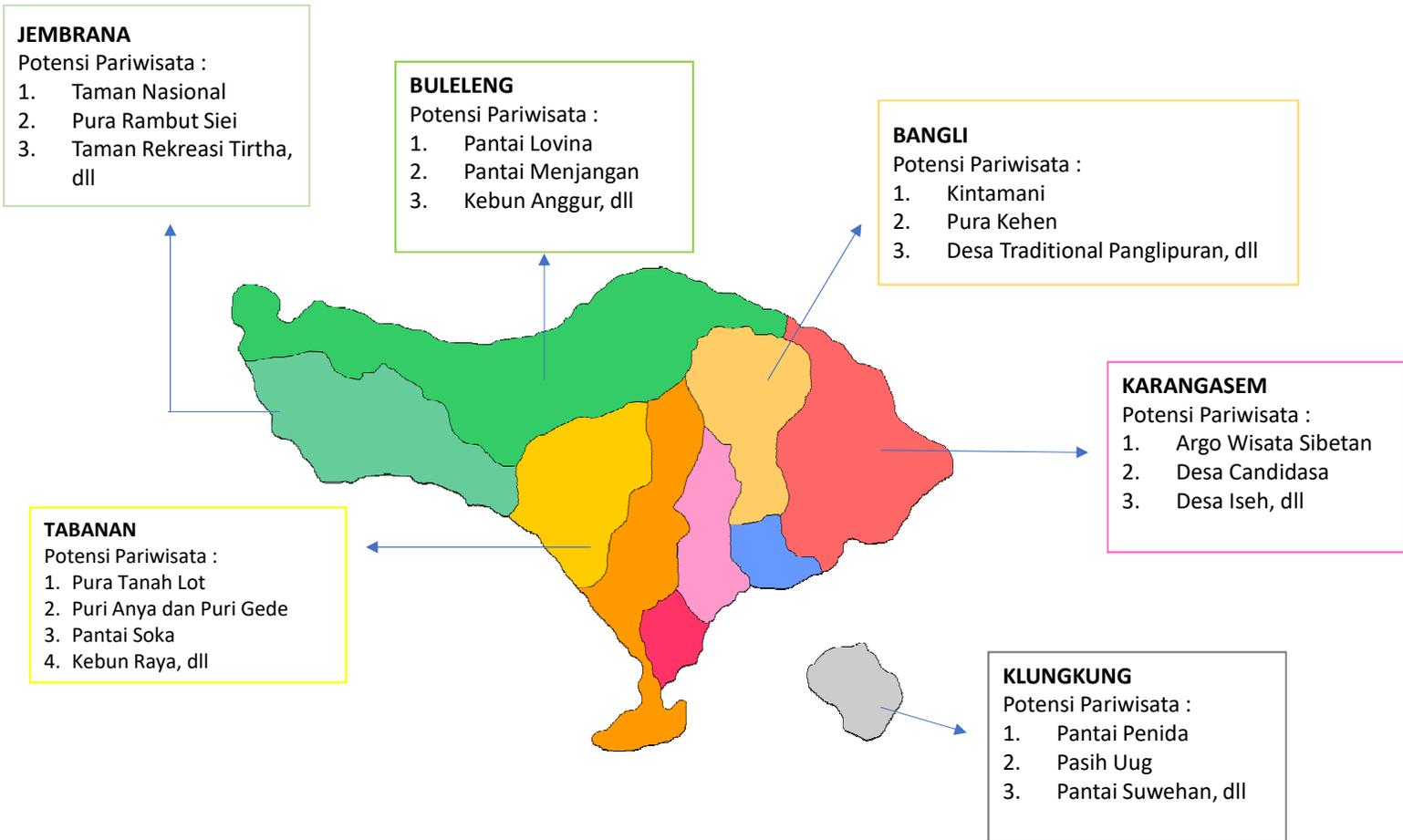
Penggunaan Bantuan keuangan hasil pajak hotel dan pajak resto Kab. Badung

Masa Berlaku 12 bulan sejak ttd Para Pihak (Bulan Mei 2017)

Pertanggung jawaban realisasi penggunaan dana Bantuan keuangan hasil pajak hotel dan pajak resto Kab. Badung



# Potensi Pariwisata Bali





**Terima kasih**